



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Jl. H.M Rafi'i No. 03 , Pangkalan Bun, Madurejo, Kotawaringin Barat



# DOKUMEN **KAJIAN**

## KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



**DOKUMEN KAJIAN  
KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

**DAFTAR ISI**



<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>_____</b>	<b>_____</b>
1. Latar Belakang	_____	1
2. Dasar Hukum	_____	2
3. Maksud dan Tujuan	_____	5
4. Ruang Lingkup Perencanaan	_____	5
a. Lingkup Wilayah	_____	5
b. Lingkup Substansi	_____	6
<b>BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN</b>	<b>_____</b>	<b>8</b>
1. Major Project RPJMN	_____	9
2. Perpres 3 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan	_____	10
3. Peraturan daerah no 5 TAHUN 2015 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	_____	15
4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Prov. Kalimantan Tengah	_____	23
5. SK NO 6627 TAHUN 2021	_____	23
6. Keputusan Menteri Perhubungan Republic Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kumai	_____	27
7. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional	_____	29
<b>BAB 3 GAMBARAN UMUM</b>	<b>_____</b>	<b>31</b>
1. Kegiatan Perkebunan	_____	32
2. Kegiatan Industri Pengolahan Kelapa Sawit	_____	36

**DOKUMEN KAJIAN  
KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

3.	Infrastruktur Pendukung Pelabuhan_____	42
----	--	----

**BAB 4 ANALISIS**

1.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang_____	44
2.	Analisis Produk Industri Turunan_____	48
3.	Kendala Dalam Rantai Pasok Industri Pengolahan _____	52
4.	Aliran Rantai Pasok & Keterkaitan Antar Industri Pengolahan _____	53
5.	Keterkaitan Dan Aspek Permintaan_____	55
6.	Industri Turunan Prioritas_____	58
7.	Simbiosis Dalam Ekosistem Perkebunan Dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit _____	61
11.	SWOT _____	62

**BAB 5 VISI PENGEMBANGAN, KEBIJAKAN & STRATEGI HILIRISASI**

	INDUSTRI_____	67
1.	Visi Pengembangan_____	68
	1.1 Rumusan Kebijakan _____	68
	1.2 Strategi _____	68
2.	Peran Pemerintah Dalam Hilirisasi Industri_____	69
3.	Indikasi Program _____	72

**DOKUMEN KAJIAN  
KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

**DAFTAR TABEL**



Tabel 1 Tujuan Kebijakan dan Strategi Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan _____	10
Tabel 2 Kebijakan RTRW Provinsi Terkait Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat _____	15
Tabel 3 Penetapan Kawasan Hutan Di Wilayah Kotawaringin Barat Menurut SK 6627/2021 _____	23
Tabel 4 Penetapan Klasifikasi Industri Prioritas Nasional _____	29
Tabel 5 Konsesi Lahan Perkebunan di Kabupaten Kota Waringin Barat _____	31
Tabel 6 Kinerja Produksi Perusahaan Perkebunan dan Industri Pengolahan di Kabupaten Kotawaringin Barat _____	36
Tabel 7 Area Konsesi Perkebunan Terindikasi Masuk Kawasan Hutan _____	45
Tabel 8 Ekosistem Industri Pada Produk CPO dan Turunan Lainnya _____	56
Tabel 9 Matriks Analisis SWOT Di Wilayah Perencanaan _____	64
Tabel 10 Pemberitan Insentif Pajak Untuk Kegiatan Usaha Yang Terkait Dengan Kelapa Sawit _____	71
Tabel 11 Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Prov, dan Pemerintah Kabupaten Dalam Program Hilirisasi Industri _____	73
Tabel 12 Indikasi Program Pembangunan Untuk Mendukung Upaya Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat _____	75

**DOKUMEN KAJIAN  
KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

## DAFTAR GAMBAR



Gambar 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	7
Gambar 2 Sebaran Lokasi Pembangunan Smelter	9
Gambar 3 Sebaran 9 Lokasi Kawasan Industri	9
Sumber: Perda 5 Tahun 2015	
Gambar 4 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	21
Gambar 5 Rencana Pola Ruang Kotawaringin Barat Menurut RTRW Prov. Kalimantan Tengah	22
Gambar 6 Arah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP3K) Prov. Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Kotawaringin Barat	24
Gambar 7 Fasilitas Alur Utama Pelayaran Kumai	25
Gambar 8 Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Kotawaringin Barat Menurut SK 6627/2021	26
Gambar 9 Koridor One Way Alur Perairan Kumai	27
Gambar 10 Rencana Penetapan Alur Masuk dari dan Menuju Pelabuhan Kumai	28
Gambar 11 Sebaran Lahan Konsesi Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat	40
Gambar 12 Situasi dan Kondisi Kawasan Perkebunan dan Industri Pengolahan PT. BGA	41
Gambar 13 Situasi dan Kondisi Kawasan Perkebunan dan Industri Pengolahan PT. SSS	41
Gambar 14 Kondisi dan situasi kawasan pelabuhan Bumiharjo	42

**DOKUMEN KAJIAN  
KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

Gambar 15 Analisis Lokasi Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Rencana Penetapan Kawasan Perkebunan (PK. RTRW Kab. Kotawaringin Barat) _____	46
Gambar 16 Analisis Posisi Konsesi Perkebunan Terhadap SK Penetapan Kawasan Hutan _____	47
Gambar 17 Proses Pengolahan Kelapa Sawit Secara Upstream Menghasilkan CPO dan CPKO _____	48
Gambar 18 Diagram Proses Downstream CPO/CPKO Menghasilkan produk Oleokimia _____	49
Gambar 19 Diagram Proses Downstream Pengolahan Fatty Alcohols _____	50
Gambar 20 Produk Turunan (diversifikasi) Industri Kelapa Sawit _____	51
Gambar 21 Skema Pola Aliran Rantai Pasok Industri Pengolahan Kelapa Sawit _____	53
Gambar 22 Analisis Pola Aliran Rantai Pasok PT. SAP Di Kotawaringin Barat _____	54
Gambar 23 Aliran Eksport Material CPO & Produk Turunan Lain dari Kalimantan Tengah _____	55
Gambar 24 Prospek dan Peluang Pengolahan Batang Pohon Sawit Menjadi Gula Merah _____	59
Gambar 25 Prospek dan Peluang Pengolahan Batang Pohon Kelapa Sawit Menjadi Produk Furniture & Aneka Asesoris Lainnya _____	59
Gambar 26 Prospek dan Peluang Pengolahan cangkang dan steering menjadi malam untuk Batik _____	60
Gambar 27 Prospek dan Peluang Biomassa dan Limbah Kelapa Sawit Menjadi Pupuk Organik & Pupuk Cair _____	60
Gambar 28 Simbiosis Dalam Sistem Konservasi Sumberdaya Alam Hayati di Perkebunan Sawit _____	62

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

**1. LATAR BELAKANG**

Pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan menjadi syarat utama bagi Indonesia untuk bertransformasi menuju perekonomian yang maju. Hal ini membutuhkan dukungan dari struktur transaksi berjalan yang sehat, yang didukung oleh sektor manufaktur yang kuat. Hilirisasi sendiri, menjadi bagian dari upaya pengembangan industri manufaktur dengan menciptakan struktur industri yang kuat dan bernilai tambah tinggi. Hal tersebut akan mendorong peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan terintegrasi dengan global value chain sekaligus mengurangi impor. Lebih lanjut, hilirisasi dapat memperkuat keterkaitan domestik dengan industri pendukung dari daerah lainnya yang mendorong pembangunan yang semakin inklusif. (Presidensi G20, Jakarta 14-19 Februari 2022)

Di tengah potensi hilirisasi yang dimiliki, terdapat berbagai tantangan yang masih mengemuka, baik dampak hilirisasi kepada perekonomian yang perlu diperluas, maupun tantangan terkait faktor produksi, serta regulasi dalam hal implementasi industri hijau. Terkait tantangan hilirisasi ini, yakni gambaran mengenai tantangan dari sisi pembiayaan hijau, implementasi teknologi rendah karbon, serta bantuan teknis dan pelatihan yang diperlukan. Sementara itu, tidak lupa tentang pentingnya peningkatan kompleksitas produk ekspor, dukungan Pemerintah yang diperlukan untuk iklim investasi, serta keterlibatan sektor swasta dan mendiskusikan insentif yang diperlukan.

Berbicara terkait potensi hilirisasi, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan produk hilir turunan minyak sawit. Hal ini didukung ketersediaan bahan baku industri yang melimpah, dimana produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) mencapai 52,14 juta ton pada tahun 2020. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa merupakan potensi pasar yang sangat besar untuk produk hilir minyak sawit pangan, personal wash, personal care, hingga biofuel. Beberapa capaian kuantitatif sektor industri kelapa sawit bagi ekonomi nasional, di antaranya menyumbang devisa ekspor lebih dari Rp 300 triliun per tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang. (Kemenperin, 2021).



**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sasaran pembangunan hilirisasi industri kelapa sawit dimana sebagai sumber daya utama yang dimiliki Kalimantan Tengah. (*Focus Group Discussion* kegiatan Studi Lapangan Isu Strategis Nasional PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI). Dimana pada tahun 2021, produksi sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 84.169,59 ton (BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2022). Terkini, potensi hilirisasi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu disusun dan dikaji secara komprehensif sehingga mampu mewujudkan pengembangan hilirisasi industri yang optimal bagi kemajuan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam rangka mewujudkan dokumen rujukan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan **Kajian Potensi Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat** pada Tahun Anggaran 2023.

## **2. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum **Kajian Potensi Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat** adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Industri Nasional 2020-2024
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Permentan/OT.140/2/2010 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (Tbs) Kelapa Sawit Produksi Pekebun
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

- Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional
  25. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Standar Industri Hijau untuk minyak goreng dari Kelapa Sawit
  26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib
  27. Keputusan Menteri Perhubungan No 65 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alur-pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-pelayaran Masuk Pelabuhan Kuma
  28. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2037
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Niaga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Rakyat
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

### **3. MAKSUD, & TUJUAN**

Maksud dari kegiatan ini adalah penyusunan Kajian Potensi Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terarah, tepat sasaran, serta sinergis antar sektor dan wilayah.

Tujuan dari penyusunan Kajian Potensi Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin antara lain:

1. Terwujudnya Kajian Potensi Hilirisasi Industri yang sinergis antar sector dan wilayah.
2. Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan Kajian Potensi Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk menemkenali dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek Kajian Potensi Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Mendorong terwujudnya Kajian Potensi Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan di perindustrian dan perdagangan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah menyusun Kajian Potensi Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terarah, tepat sasaran, serta sinergis antar sektor dan wilayah sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengoptimalkan pengembangan industri

### **4. RUANG LINGKUP PERENCANAAN**

#### **a. Lingkup Wilayah**

Lingkup kajian mencakup seluruh kegiatan industri berbasis kelapa sawit yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas 6 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Kotawaringin Lama. Hal ini seperti terlihat pada gambar 1.1

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

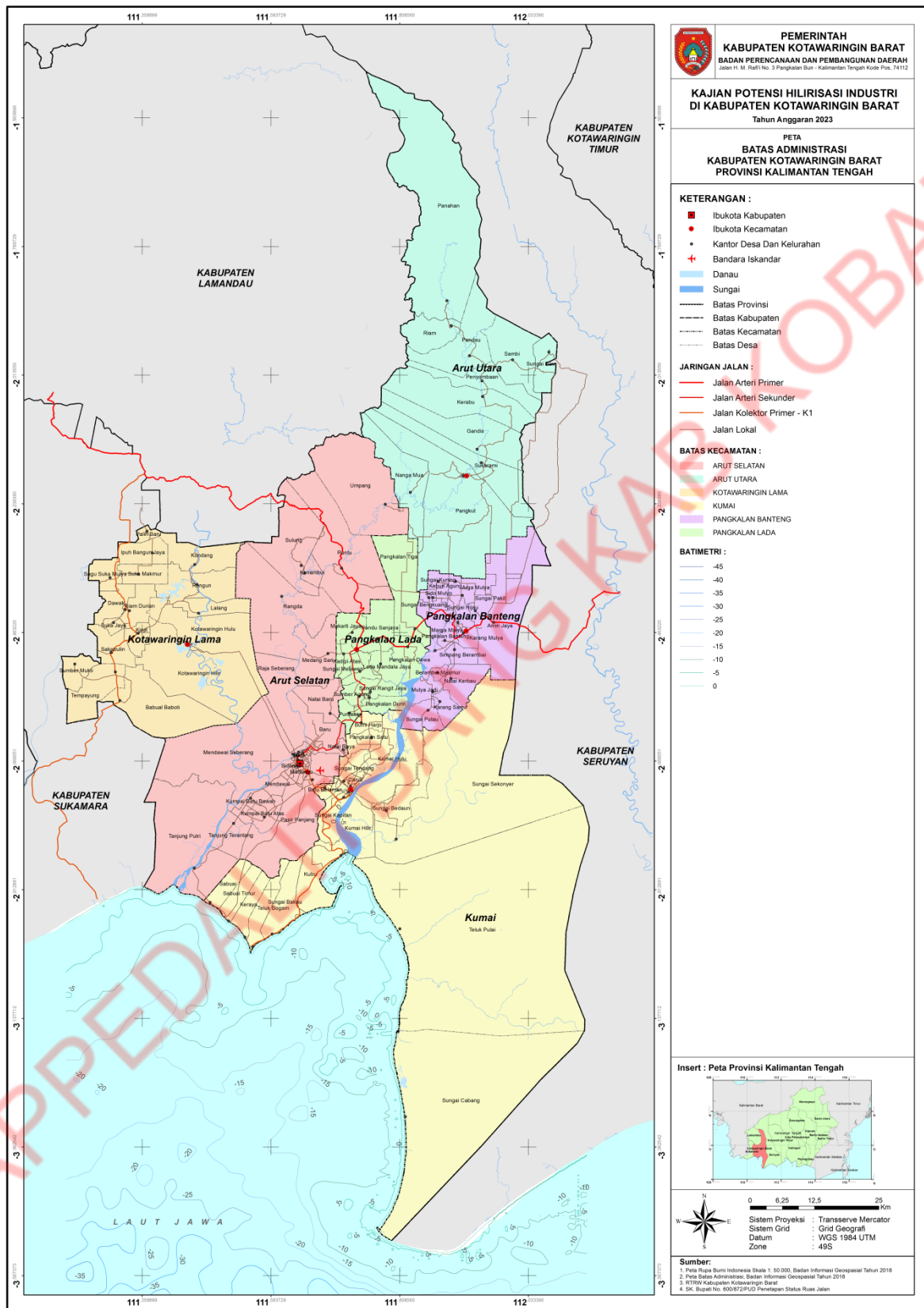
**b. Lingkup Substansi**

Tahapan penyusunan Kajian Potensi Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Potensi Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi potensi produksi :
  - a) Market share
  - b) Nilai tambah bisnis
  - c) Nilai tambah teknis
  - d) Forward-backward linkage
  - e) Potensi permintaan
  - f) Lokasi penyebaran
- 2) Identifikasi Permasalahan dan Tantangan Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat
- 3) Penyusunan Konsep, Strategi dan Perluasan Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat

# EXECUTIVE SUMMARY

## DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

**BAB 2**  
**TINJAUAN KEBIJAKAN**



**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**1. MAJOR PROJECT RPJMN**

Dalam Perpres No 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Terdapat 41 Major Project yang digulirkan pemerintah, 7 project diantaranya berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat). Infrastruktur dan Sector yang menjadi bagian Major Project Di Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat) meliputi Sektor Industri, Sektor Energi, Prasarana dan Sarana Permukiman,. 7 Major Project di Wilayah Kotawaringin Barat secara spesifik dapat dilihat pada tabel



Gambar 2 Sebaran Lokasi Pembangunan Smelter



Gambar 3 Sebaran 9 Lokasi Kawasan Industri



**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**2. PERPRES 3 TAHUN 2012 RENCANA TATA RUANG PULAU KALIMANTAN**

Ketentuan terkait pengembangan sistem perkotaan dan fungsi ruang di pulau Kalimantan diatur dalam Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 3 Tahun 2012. Beberapa kebijakan yang perlu dicermati terkait kajian Hilirisasi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat secara spesifik seperti terlihat pada table

Tabel 1 Tujuan Kebijakan dan Strategi Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

Tujuan Penataan Ruang	Kebijakan	Strategi
kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia;	1. pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan;	a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan; b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik di kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung; c. mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan dengan meningkatkan fungsi ekologis di kawasan hutan produksi
	2. pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi;	a. menetapkan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam; b. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya yang berfungsi sebagai koridor ekosistem c. membatasi perkembangan kawasan permukiman pada wilayah yang berfungsi sebagai koridor ekosistem; dan d. mengembangkan prasarana yang ramah lingkungan sebagai pendukung koridor ekosistem
	3. pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;	a. mempertahankan luasan dan meningkatkan fungsi kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau; c. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Tujuan Penataan Ruang	Kebijakan	Strategi
	4. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempertahankan permukiman masyarakat adat dan menyediakan akses bagi masyarakat adat yang tidak mengganggu kawasan berfungsi lindung;</li> <li>b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu wilayah sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi</li> </ul>
kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan	1. pengembangan energi baru dan terbarukan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB);</li> <li>b. mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);</li> <li>c. mendorong pengembangan pembangkit listrik pada mulut tambang di kawasan pertambangan batubara</li> </ul>
	2. pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Kalimantan;</li> <li>b. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Kalimantan dan wilayah lain di luar Pulau Kalimantan untuk mendukung sistem penyediaan tenaga listrik nasional</li> </ul>
pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di Pulau Kalimantan	1. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi; dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;</li> <li>b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi</li> </ul>
	2. pengembangan	a. mengendalikan perkembangan kawasan

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Tujuan Penataan Ruang	Kebijakan	Strategi
	<p>kawasan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p>	<p>pertambangan yang mengganggu kawasan berfungsi lindung;</p> <p>b. mengembangkan sentra-sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</p> <p>c. melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang pada kawasan peruntukan pertambangan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem</p>
<p>pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara berkelanjutan</p>	<p>1. pengembangan sentra-sentra perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan</p> <p>2. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan</p>	<p>a. mengembangkan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dan karet serta kawasan peruntukan hutan; dan</p> <p>b. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya perkebunan kelapa sawit dan karet yang mengganggu kawasan berfungsi lindung</p> <p>a. mengembangkan industri pengolahan lanjut kelapa sawit, karet, dan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;</p> <p>b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan/atau hasil hutan</p>
<p>kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup</p>	<p>1. percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>2. pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit sebagai titik-titik garis pangkal</p>	

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Tujuan Penataan Ruang	Kebijakan	Strategi
	kepulauan Indonesia	
pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air	1. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai kota tepi air (waterfront city);	a. mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan yang berdekatan/menghadap badan air; b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai; dan c. mengembangkan jaringan transportasi sungai yang didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai
	2. pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir	a. mengembangkan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai; b. menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir.
kawasan ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata budaya Kalimantan	1. pengembangan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa dan tumbuhan endemik kawasan lainnya;	a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekowisata pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan; dan b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan antara kawasan ekowisata dan obyek wisata lainnya dan antara kawasan ekowisata dan kawasan perkotaan nasional
	2. pengembangan kawasan wisata berbasis budaya Kalimantan	a. melestarikan kawasan permukiman berbasis budaya Kalimantan; dan b. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antara kawasan wisata budaya dan kawasan perkotaan nasional
jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah	pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah	a. mengembangkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api secara terpadu untuk menghubungkan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan sentra produksi komoditas unggulan dan pelabuhan dan/atau bandar udara; b. mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan, transportasi sungai dan penyeberangan; c. mengembangkan alur-alur pelayaran untuk menjangkau pusat pertumbuhan dan pusat

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Tujuan Penataan Ruang	Kebijakan	Strategi
		permukiman di wilayah pedalaman; d. meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkan antarlurpelayaran sungai
swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.	1. pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian sawah beririgasi, rawa pasang surut, dan sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;	a. mempertahankan luasan kawasan peruntukan pertanian sawah beririgasi, rawa pasang surut, dan sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan; c. mengendalikan alih fungsi lahan kawasan peruntukan pertanian sawah menjadi non sawah.
	2. pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan lahan pertanian;	a. memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduknya dan jaringan irigasi teknis; b. memelihara dan mengembangkan jaringan irigasi pasang surut.
	3. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional	a. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan di kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian untuk ketahanan pangan; b. mengembangkan sentra produksi perikanan dengan memperhatikan potensi lestari; c. mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan perikanan

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**3. PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2015 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Kebijakan Spasial yang memuat Rencana tata ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015, beberapa hal yang perlu dicermati dari aturan tersebut terkait dengan hilirisasi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat secara spesifik diuraikan dalam table berikut

Tabel 2 Kebijakan RTRW Provinsi Terkait Hilirisasi Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Ketentuan	Uraian
1	Tujuan Penataan Ruang	Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2	Struktur Ruang	
	<input type="checkbox"/> Pusat Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PKN Kota Palangkaraya</li> <li>b. PKW meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, <b>Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat</b>, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan;</li> <li>c. PKL meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung, Raya Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan</li> </ul>
	<input type="checkbox"/> Peran dan Fungsi	Peran dan fungsi Pada PKW Pangkalan Bun Kotawaringin Barat diarahkan sebagai Pusat Distribusi-Koleksi Regional-Nasional, Pusat Transportasi Laut (Umum) Regional-Nasional, Pusat Transportasi Laut (Fery) Regional-Nasional, Pintu Sekunder Transportasi Udara Regional-Nasional, Pusat Jasa Transportasi Darat Regional, Pusat Jasa Transportasi Sungai Regional, Pusat Jasa Keuangan Regional, Pusat Jasa Pariwisata Regional, Pusat Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten
	<input type="checkbox"/> Sistem Jaringan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan</li> </ul> Jaringan prasarana angkutan jalan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Terminal penumpang Tipe A di Palangka Raya, Ampah, Muara Teweh, Nanga Bulik dan Pangkalan Bun dan terminal penumpang Tipe B di Kota Sukamara, Sampit, Kuala Pembuang, Kasongan, Pulang Pisau, Kuala Kurun, Buntok, Tamiyang Layang, Puruk Cahu dan Kuala Kapuas. Penentuan lokasi terminal penumpang</li> </ul>

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Ketentuan	Uraian
		<p>dipertimbangkan yang dekat atau berakses tinggi terhadap moda transportasi lainnya;</p> <p>2) Terminal barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya di dekat pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan yaitu di Kumai, Sampit dan Kuala Kapuas; dan</p> <p>3) Jembatan Timbang Anjir serapat Km 12 di Kapuas, Jembatan Timbang Pasar Panas di Barito Timur, Jembatan Timbang Simpang Runtu di Kotawaringin Barat, Jembatan Timbang Sampit di Kotawaringin Timur, Jembatan Timbang Simpang Kandui di Barito Utara, Jembatan Timbang Bukit Liti di Pulang Pisau, Jembatan Timbang Lamandau di Lamandau, Jembatan Timbang ruas jalan Bahaur - Pulang Pisau di Pulang Pisau, Jembatan Timbang ruas jalan Sampit - Kuala Pembuang.</p> <p>b. Rel Kereta Api</p> <p>1) Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Jalur kereta api Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung;</li> <li><input type="checkbox"/> Jalur kereta api Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang - Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas;</li> <li><input type="checkbox"/> Jalur kereta api Rabambang – Tumbang Samba – Sampit –Kuala Pembuang – Teluk Segintung;</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; dan</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai.</b></li> </ul> <p>2) Pengembangan jaringan kereta api di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan prioritas tinggi dan dititikberatkan pada angkutan barang.</p> <p>c. Pelabuhan</p> <p>Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang bersinggungan langsung dengan Kotawaringin Barat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sungai Jelai: Balai Riam - Sukamara - Kuala Jelai;</li> <li>2. Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Sukamara – Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;</li> <li>3. Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun - Mendawai Seberang - Tanjung Putri;</li> <li>4. Sungai Kumai: Pangkalan Banteng - Kumai;</li> </ol> <p>Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang bersinggungan langsung dengan Kotawaringin Barat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kumai – Kendal di Jawa Tengah (Lintas Penghubung Sabuk);</b></li> <li>2. Bahaur – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk);</li> </ol>

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Ketentuan	Uraian
		<p>3. Kumai – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk);</p> <p>4. Bahaur – Kendal (Lintas Penghubung Sabuk).</p> <p>Tatanan kepelabuhanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Sampit;</li> <li>b. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul adalah: Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; Pelabuhan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; Pelabuhan Sukamara di Kabupaten Sukamara; Pelabuhan Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan; Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas; Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan Pelabuhan Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas.</li> <li>c. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan regional adalah: Pelabuhan Kelanis di Kabupaten Barito Selatan; Pelabuhan Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan; Pelabuhan Pegatan Mendawai di Kabupaten Katingan; Pelabuhan Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur; Pelabuhan Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya; Pelabuhan Teluk Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau; Pelabuhan Bukit Pinang di Kota Palangka Raya; dan Pelabuhan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.</li> <li>d. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal adalah Pelabuhan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau; Pelabuhan Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur; Pelabuhan Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara;</li> <li>e. Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat; Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur; Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan; Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.</li> <li>f. Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sebagai pangkalan pendaratan ikan (PPI) adalah: PPI Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau; PPI Batanjung di Kabupaten Kapuas; PPI Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara; PPI Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; <b>PPI Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat</b>; PPI Selat Jeruju Pagatan di Kabupaten Katingan; PPI Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur.</li> <li>g. Tatanan kepelabuhanan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan serta perbaikan peralatan instalasi militer TNI AL.</li> </ol>
		Tatanan kebandarudaraan provinsi Kalimantan Tengah meliputi:



**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Ketentuan	Uraian
		<p>a. Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier yaitu: Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya dan Iskandar di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.</p> <p>Rencana Pembangunan Bandara Baru Internasional/Nasional meliputi: Bandara Internasional di Km. 70 Jalan Palangka Raya - Kasongan dan <b>Bandara Nasional di Desa Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat.</b></p> <p>b. Bandara pengumpan yang meliputi : Haji Asan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan, Tumbang Samba di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Dirung di Kabupaten Murung Raya, Beringin di Kabupaten Barito Utara dan Sanggu di Kabupaten Barito Selatan.</p> <p>Rencana Bandara Baru meliputi : Bandara di desa Trinsing di Barito Utara, Bandara di desa Bahitom di Murung Raya, Bandara di desa Guci di Lamandau, Bandara di desa Kandris Barito Timur dan Bandara di desa Natai Sedawak di Kabupaten Sukamara.</p> <p>c. Tatanan kebandarudaraan harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat - pesawat TNI dan Polri beserta peralatan dan perlengkapan pendukungnya.</p>
3	Rencana Pola Ruang	<p>Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, Rencana Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk kegiatan antara lain Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi yang dapat dikonversi, Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertanian, Kawasan Budidaya Lainnya</p>
4	Kawasan Strategis	<p>1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Kota Palangka Raya;</li> <li>b. Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya;</li> <li>c. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis yang terdapat di Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Lamandau;</li> <li>d. Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak berlokasi di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, <b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>, Kabupaten Sukamara,</li> </ol>

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Ketentuan	Uraian
		<p>Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya;</p> <p>e. Kawasan pertanian lahan gambut di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya</p> <p>f. Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kota Waringin Timur, <b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya;</p> <p>g. Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao) di 14 Kab/Kota</p> <p>h. Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara berupa <b>KSP Pangkalan Bun - Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat</b>, KSP Sampit - Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur, KSP Batanjung - Kapuas di Kabupaten Kapuas, Sigintung di Kabupaten Seruyan dan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;</p> <p>i. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di <b>Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat</b>, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Lamunti Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>j. Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, <b>Kabupaten Kotawaringin Barat</b>, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Seruyan</p> <p>2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi:</p> <p>a. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>b. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten</p>

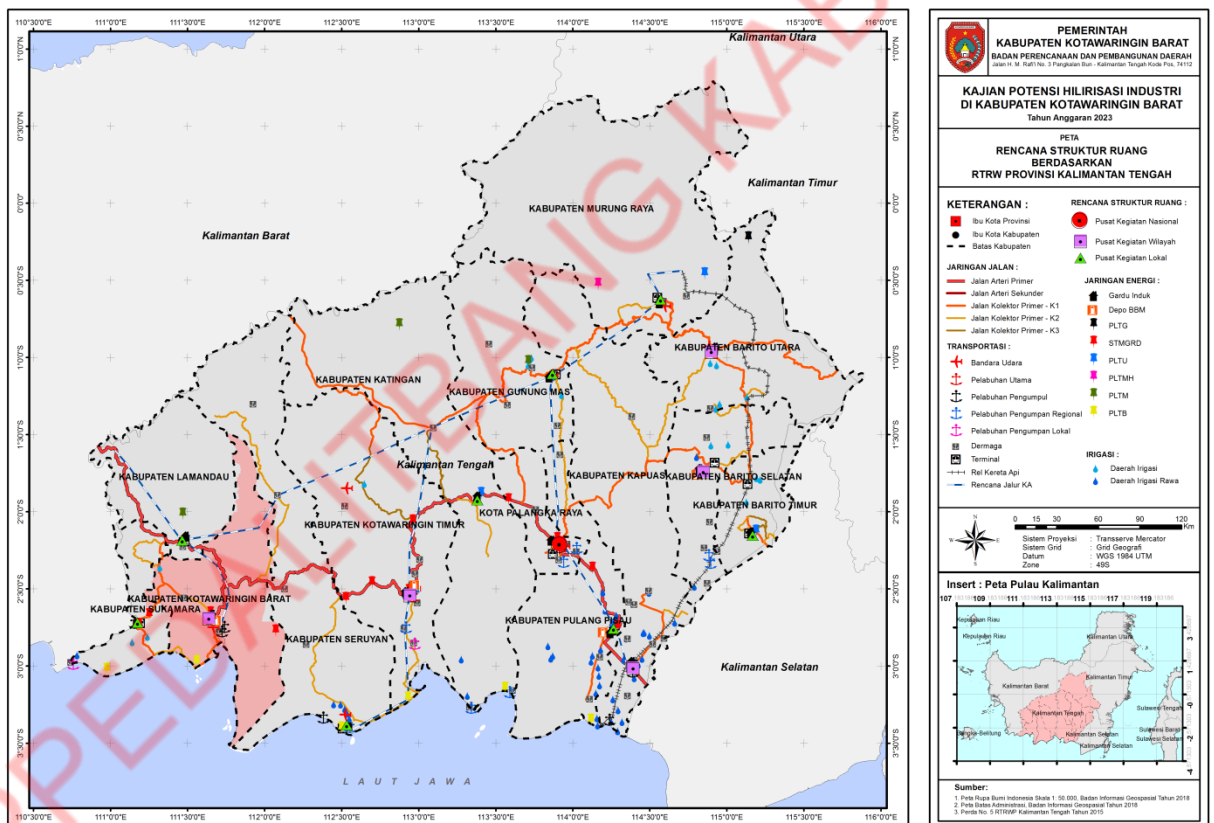
**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Ketentuan	Uraian
		<p style="text-align: center;">Kotawaringin Timur.</p> <p>3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:</p> <p>a. Kawasan Strategis Ekosistem Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Kawasan Ekosistem Air Hitam di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau;</li> <li>□ Kawasan Ekosistem Pantai (mangrove) di sepanjang jalur pantai selatan Provinsi Kalimantan Tengah; dan</li> <li>□ Kawasan Ekosistem Gambut terdiri atas kawasan rawa gambut, kawasan kubah gambut, dan kawasan gambut tebal yang tersebar di dataran bagian Selatan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ul> <p>b. Kawasan Strategis DAS meliputi DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, <b>DAS Arut</b>, DAS Lamandau, <b>DAS Kumai</b> dan DAS Sebangau.</p> <p>c. Kawasan Strategis <i>Heart of Borneo (HoB)</i> meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Utara.</p> <p>4. Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung dan Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya;</li> <li>b. Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya;</li> <li>c. Cagar Alam Pararawen I dan II di Kabupaten Barito Utara;</li> <li>d. <b>Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara;</b></li> <li>e. <b>Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan;</b></li> <li>f. Taman Nasional Sebangau, Pahewan Kalawa, Danau Sabuah di Kabupaten Pulang Pisau;</li> <li>g. Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, Pahewan Kalaru, Danau Kamipang di Kabupaten Katingan;</li> <li>h. <b>Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat;</b></li> <li>i. Konservasi Anggrek Hitam di Kabupaten Barito Timur;</li> <li>j. Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan;</li> <li>k. Danau Burung di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan</li> <li>l. Hutan Monumental Nyaru Menteng, Danau Rawet, Danau Tahai, Pulau Kaja, Pahewan Tabalien, Danau Tundai, Danau Lewu di Kota Palangka Raya.</li> </ul> <p>5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Strategis Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi</li> </ul>

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Ketentuan	Uraian
		<p>Kabupaten Gunung Mas;</p> <p>b. Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan, seperti Pahewan Kalawa di Kabupaten Pulang Pisau, Pahewan Kalaru di Kabupaten Katingan dan Pahewan Tabalien di Kota Palangka Raya;</p> <p>c. Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota; dan</p> <p>d. Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>

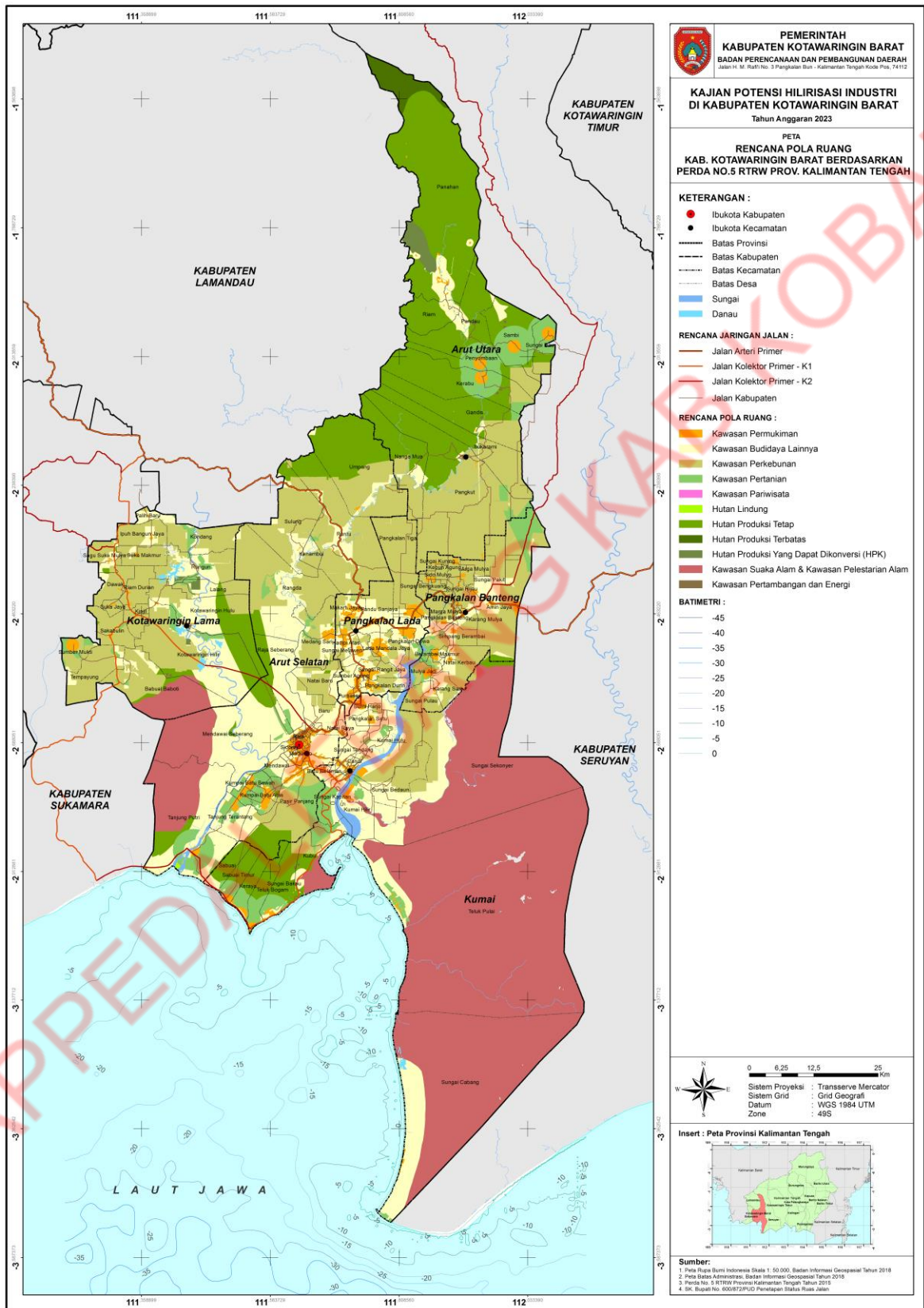
Sumber: Perda 5 Tahun 2015



Gambar 4 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

# EXECUTIVE SUMMARY

## DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 5 Rencana Pola Ruang Kotawaringin Barat Menurut RTRW Prov. Kalimantan Tengah

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**4. RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR PROV. KALIMANTAN TENGAH**

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil Prov. Kalimantan Tengah merupakan dokumen teknis yang secara umum mengatur ketentuan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir khususnya wilayah perairan. Berdasarkan RZWP3K Prov. Kalimantan Tengah, zonasi pemanfaatan ruang dipesisir Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk kegiatan antara lain Sub Zona DLKp-DLKr, Sub Zona Budidaya Laut, Sub Zona Pelagis dan Demersal, Sub Zona Wisata Alam Pantai, Kawasan Konservasi Perairan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil, Alur Kabel Bawah Laut (Telekomunikasi), Alur Pipa Bawah Laut (Migas), Alur Pelayaran Kumai. Penetapan zonasi wilayah pesisir kabupaten Kotawaringin Barat secara spesifik dapat dilihat pada gambar

**5. SK NO 6627 TAHUN 2021**

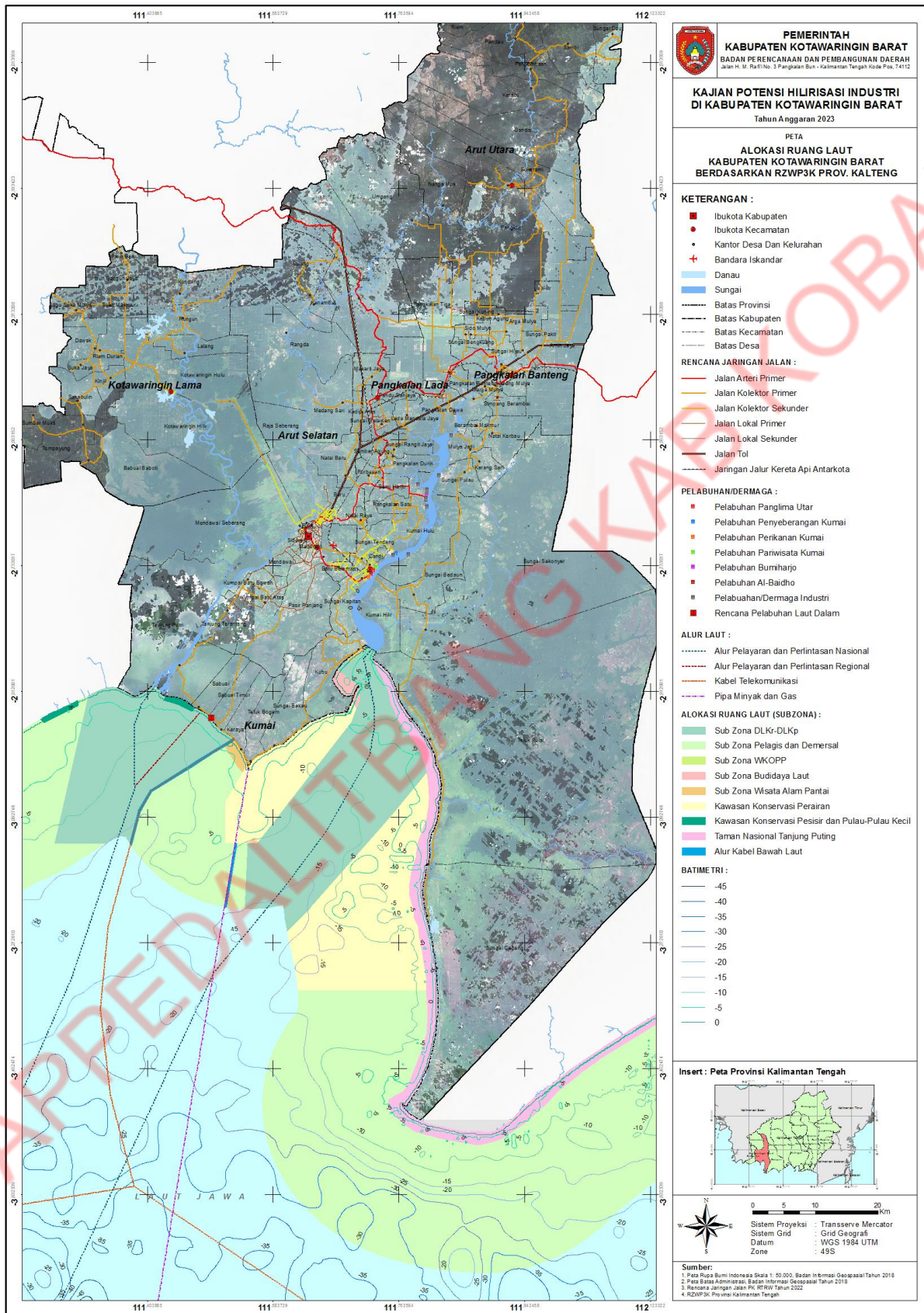
Penetapan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri LHK No 6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021. Berdasarkan lampiran data spasial yang melekat pada SK tersebut diketahui bahwa kawasan hutan yang ditetapkan di wilayah Kotawaringin Barat meliputi 10 unsur dengan rincian seperti terlihat pada table dan gambar

**Tabel 3** Penetapan Kawasan Hutan Di Wilayah Kotawaringin Barat Menurut SK 6627/2021

NO	FKH_2020	KETERANGAN	LUAS HA
1	1001	Hutan Lindung (HL)	181.49
2	10022	Suaka Margasatwa (SM)	31,138.76
3	10024	Taman Nasional (TN)	251,284.56
4	100241	Taman Nasional Perairan (TNL)	107.99
5	10025	Taman Wisata Alam/Hutan Wisata (TWA)	2,579.84
6	1003	Hutan Produksi Tetap (HP)	255,450.13
7	1004	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	5,793.88
8	1005	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	146,524.32
9	1007	Areal Penggunaan Lain (APL)	250,258.10
10	5003	Tubuh Air	9,574.43
			<b>952,893.50</b>

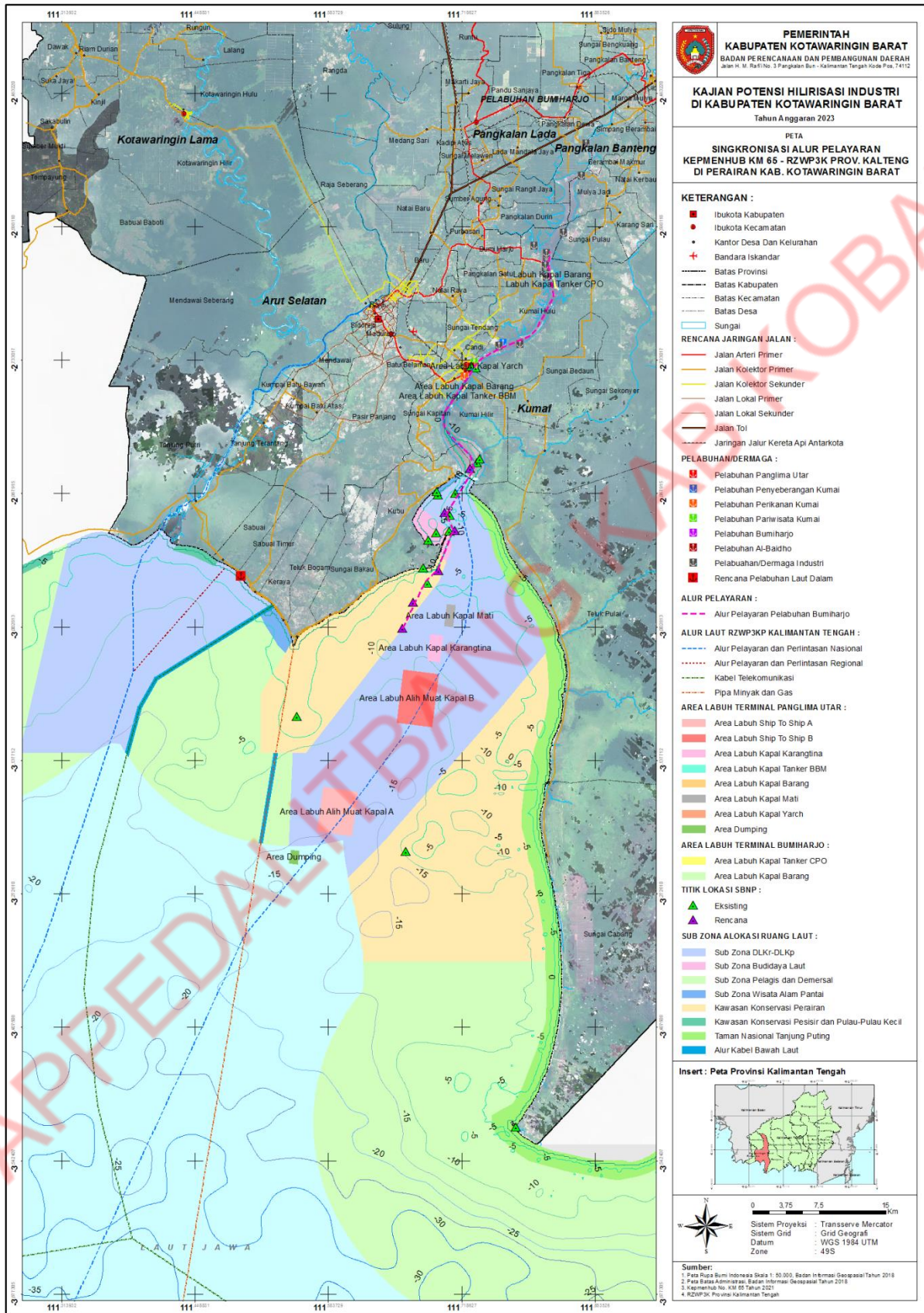
Sumber: SK MENLHK NO 6627/2021

# DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 6 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat

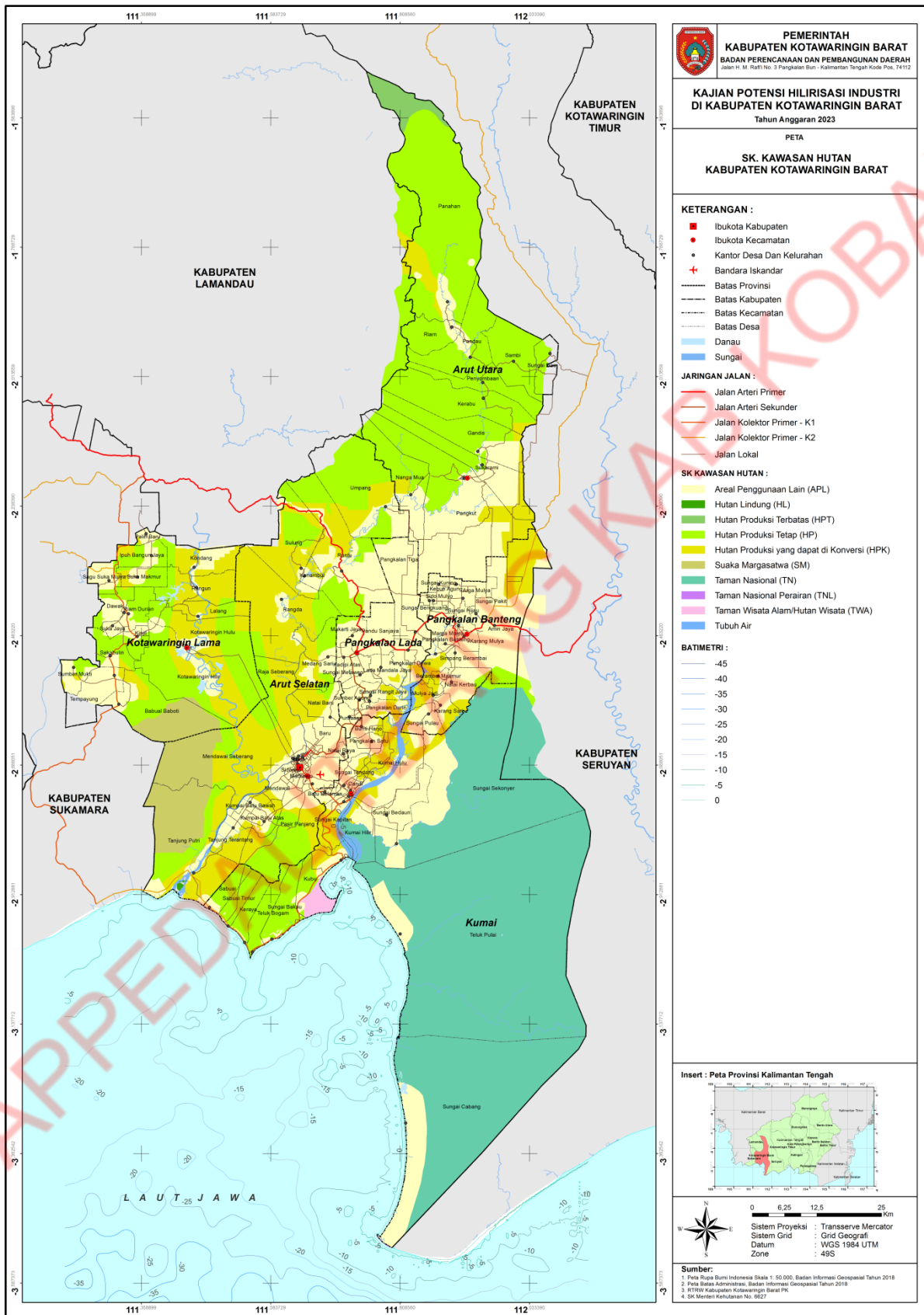
# DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 7 Fasilitas Alur Utama Pelayaran Kumai



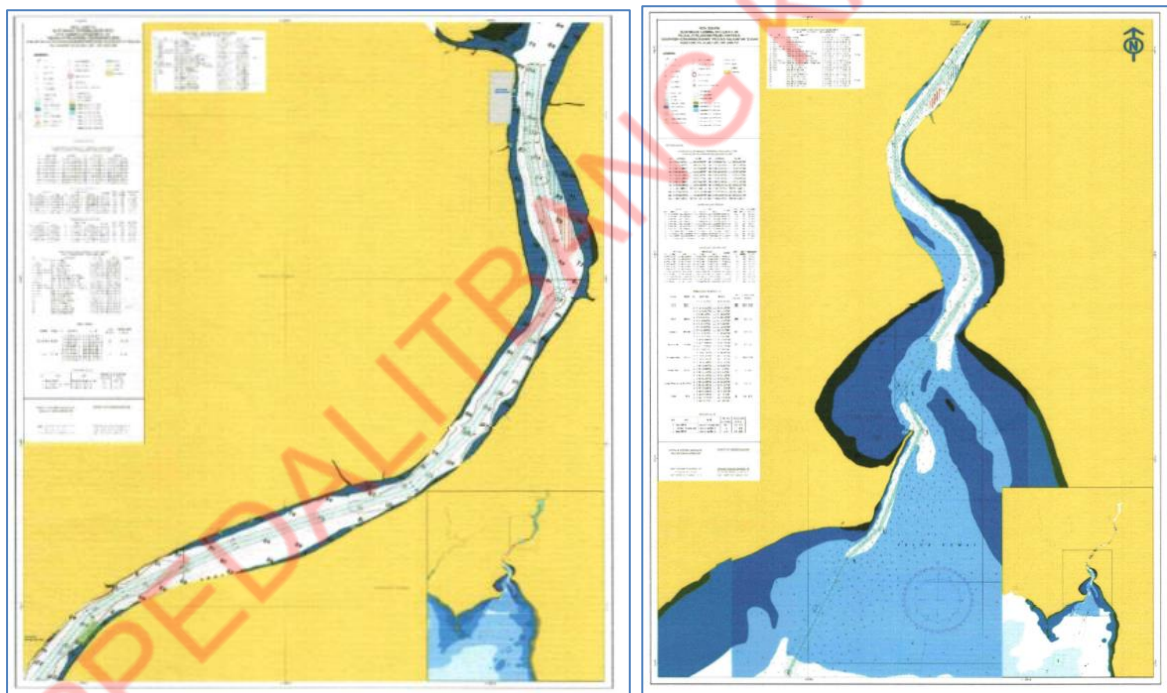
# DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 8 Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Kotawaringin Barat Menurut SK 6627/2021

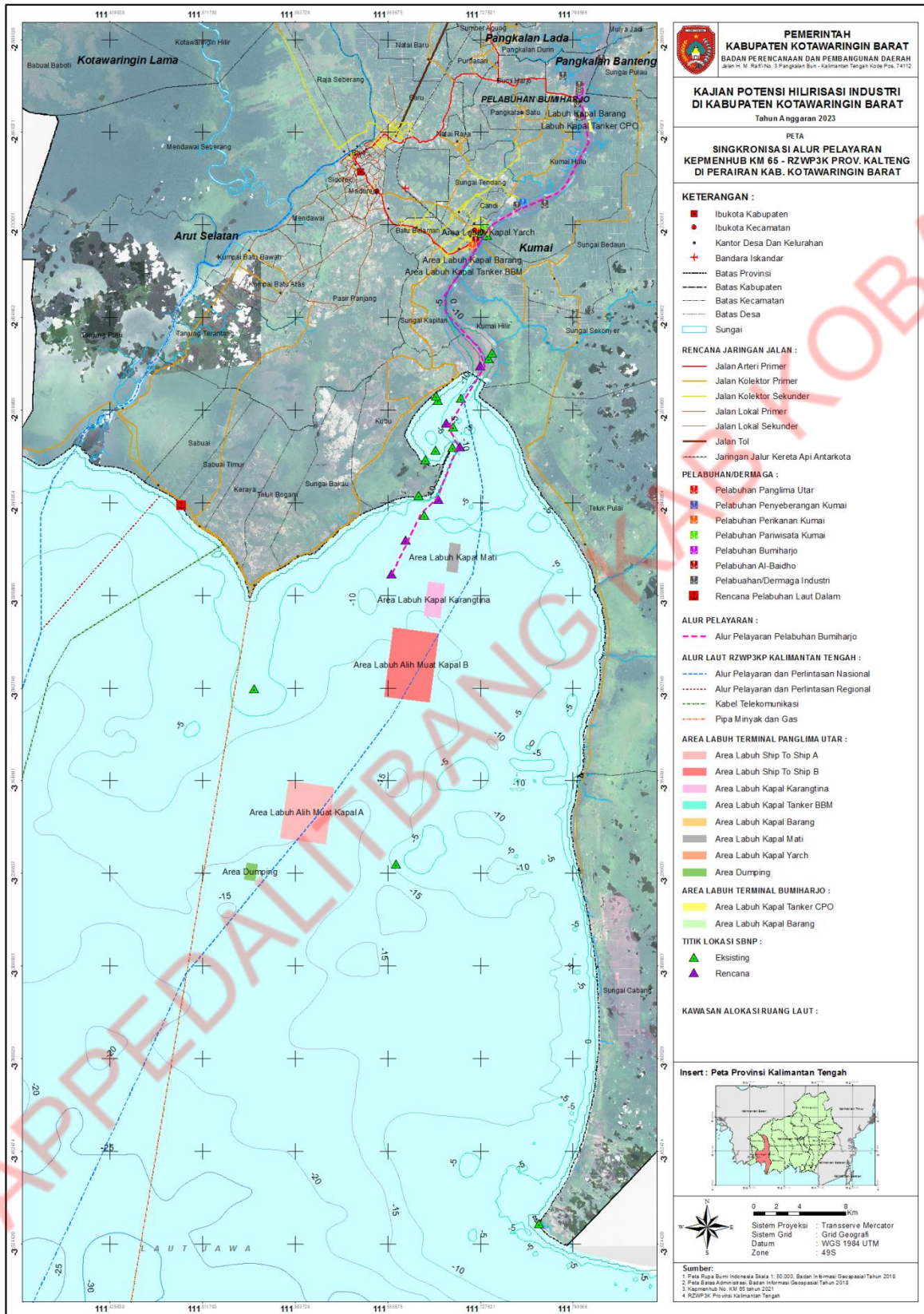
**6. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIC INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KUMAI**

Alur Pelayaran yang melintas di wilayah perairan Kumai secara keseluruhan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, mulai dari rute lintasan (wajib pandu), titik labuh, hingga aktifitas ship to ship. Peraturan ini menjadi salahsatu referensi yang mengatur tata cara berlalu lintas melalui alur perairan pelabuhan kumai dan Bumi Harjo. Alur tersebut menjadi jalur utama distribusi CPO dan komoditi unggulan lainnya menuju keluar wilayah Kotawaringin Barat. Pelabuhan kumai yang masuk dalam pelabuhan kelas IV ditetapkan wajib pandu.



Gambar 9 Koridor One Way Alur Perairan Kumai

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Gambar 10 Rencana Penetapan Alur Masuk dari dan Menuju Pelabuhan Kumai

**7. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL**

Pengembangan industri nasional secara umum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 14 TAHUN 2015 Tentang **Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035**. Dalam peraturan ini beberapa hal yang perlu dicermati antara lain Visi dan misi pembangunan industri nasional, Kebijakan dan strategi pencapaian, penetapan industri prioritas dan kegiatan indikatif. Hal ini diuraikan secara spesifik dalam table berikut

Tabel 4 Penetapan Klasifikasi Industri Prioritas Nasional

Industri Prioritas	Tahun 2020-2024	Tahun 2025-2035
INDUSTRI HULU AGRO	<b>A. Oleopangan</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Olein</i></li> <li>2. <i>Stearin</i></li> <li>3. <i>Gliserol</i></li> <li>4. <i>Palm Fatty Acid Distillate</i></li> <li>5. <i>(PFAD)</i></li> <li>6. <i>Coco butter substitute</i></li> <li>7. <i>Margarin</i></li> <li>8. <i>Shortening</i></li> <li>9. <i>Other specialty fats</i></li> <li>10. <i>Specialty fats (coco butter substitute)</i></li> <li>11. <i>Tocopherol</i></li> <li>12. <i>Betacaroten</i></li> <li>13. <i>Asam organik dan alkoho dari limbah industri sawit</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Specialty fats (coco butter substitute)</i></li> <li>2. <i>2. Tocopherol</i></li> <li>3. <i>3. Betacaroten</i></li> <li>4. <i>4. Asam organik dan alkohol</i></li> <li>5. <i>dari limbah industri sawit</i></li> </ol>
	<b>B. Oleo Kimia</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Asam lemak nabati</i></li> <li>2. <i>Fatty alcohols</i></li> <li>3. <i>Fatty amine</i></li> <li>4. <i>Methyl ester sulfonat (biosurfactant)</i></li> <li>5. <i>Biolubricant (rolling oils)</i></li> <li>6. <i>Gliserin yang berbasiskimia (glycerine basedchemicals)</i></li> <li>7. <i>Minyak atsiri</i></li> <li>8. <i>Isopropil palmitat (IPP) dan Isopropil Miristat (IPM)</i></li> <li>9. <i>Asam stearat (stearic acid)</i></li> <li>10. <i>Methyl esters</i></li> <li>11. <i>Plastik bioberbasis limbah industri sawit</i></li> <li>12. <i>Minyak atsiri</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Methyl esters</i></li> <li>2. <i>Polimer turunan minyaksawit</i></li> <li>3. <i>Minyak atsiri</i></li> </ol>
<b>C. INDUSTRI KEMURGI</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME)</i></li> <li>2. <i>Bioavtur (Bio jet fuel).</i></li> <li>3. <i>Biodiesel</i></li> <li>4. <i>Bioetanol</i></li> <li>5. <i>Bioavtur (Bio jet fuel)</i></li> <li>6. <i>Biogas dari palm oil mill effluent (POME)</i></li> <li>7. <i>Biomaterial untuk peralatan medis, aromatic building blocks berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. <i>Biodiesel(Fatty Acid Methyl Ester/FAME)</i></li> <li>10. <i>Bioavtur (Bio jet fuel)</i></li> <li>11. <i>Nano cellulose derivatives</i></li> <li>12. <i>Bio-based fiber and polymers (carbon fiber,vicous)</i></li> <li>13. <i>New generation of biobased composit</i></li> </ol>	

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Industri Prioritas	Tahun 2020-2024	Tahun 2025-2035
	8. <i>Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomassa</i>	14. <i>Secondary biofuel (bioetanol), Bioetanol (berbahan bakuligno selulosa),secondary biofuel (biomass pyrolysisgasification)</i>

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Industri Prioritas	Tahun 2020-2024	Tahun 2025-2035
	<i>D. INDUSTRI PAKAN TERNAK</i>	
	<i>Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture</i>	<i>Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture</i>
	<i>E. Industri Barang dari Kayu</i>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Komponen berbasis kayu (wood working, laminate dan dfinger joint)</i></li> <li>2. <i>Serat bambu untuk tekstil</i></li> <li>3. <i>aneka produk berbasis limbah industri kayu</i></li> </ol>	<i>Wood moulding products</i>
	<i>F. Industri Pulp dan Kertas</i>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Long fiber</i></li> <li>2. <i>Dissolving pulp</i></li> <li>3. <i>Pulp dan aneka barang kertas diproduksi secara ramah lingkungan</i></li> </ol>	<i>Microbial cellulose fiber</i>

**BAB 3**  
**GAMBARAN UMUM**



**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**1. KEGIATAN PERKEBUNAN**

Berdasarkan data konsesi lahan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat, luas area yang dimohon untuk kegiatan perkebunan mencapai 250,276.02 hektar, terdapat setidaknya 52 pelaku usaha baik yang berafiliasi maupun yang berdiri sendiri. Luasan konsesi perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Barat secara spesifik dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5 Konsesi Lahan Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	company	group_comp	groupid	type	luas_ha
1	PT. Gemareksa Mekarsari	Indhasana Group	27	HGU	177.27
2	PT. Harapan Hibrida Kalbar	Cargill	11	HGU	1,180.69
3	PT. MITRA MENDAWAI SEJATI	No group	99	HGU in process	5,996.22
4	PT. KALIMANTAN SAWIT ABADI	No group	99	HGU	1,995.31
5	PT. KALIMANTAN SAWIT ABADI	No group	99	HGU	2,496.48
6	PT. BUMITAMA GUNAJAYA ABADI	No group	99	HGU in process	5,564.85
7	PT. MITRA MENDAWAI SEJATI	No group	99	HGU in process	2,997.60
8	PT. SURYA SAWIT SEJATI	No group	99	HGU in process	4,476.47
9	PT. SURYA SAWIT SEJATI	No group	99	HGU in process	1,132.23
10	PT. SURYA SAWIT SEJATI	No group	99	HGU	2,111.42
11	PT. SURYA SAWIT SEJATI	No group	99	HGU in process	1,275.12
12	PT. SURYA SAWIT SEJATI	No group	99	HGU in process	638.90
13	PT. SURYA SAWIT SEJATI	No group	99	HGU in process	691.04
14	PT. SURYA SAWIT SEJATI	No group	99	HGU in process	421.83
15	PT. SURYA SAWIT SEJATI	No group	99	HGU in process	584.48
16	PTPN XIII	Perkebunan Nusantara	99	HGU	11,724.63
17	PT. MATA EPSI AGRO	Medco Group	42	HGU	604.43
18	PT. SUNGAI RANGIT JAYA	No group	99	HGU	2,411.09
19	PT. SUNGAI RANGIT JAYA	No group	99	HGU	231.04



**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	company	group_comp	groupid	type	luas_ha
20	PT. MATA EPSI AGRO	Medco Group	42	HGU	707.43
21	PT. Lestari Unggul Jaya	Sinar Mas	68	HGU	948.10
22	PT. MATA EPSI AGRO	Medco Group	42	HGU	333.11
23	PT. SUKSES KARYA MANDIRI	No group	99	HGU in process	0.05
24	PT. SUKSES KARYA MANDIRI	No group	99	HGU in process	40.60
25	PT. INDOTRUBA TENGAH	No group	99	HGU	608.77
26	PT. WANA SAWIT SUBUR LESTARI	No group	99	HGU	8.03
27	PT. SAWIT SUMBER MAS SARANA	No group	99	HGU	192.46
28	PT. SURYA INDAH NUSANTARA PAGI	No group	99	HGU	7,544.42
29	PT. MITRA UNGGULTAMA PERKASA	No group	99	HGU in process	4,391.60
30	PT. INDOTURBA TENGAH	No group	99	HGU	2,276.15
31	PT. WANA SAWIT SUBUR LESTARI	No group	99	HGU	8,132.86
32	PT. GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI	No group	99	HGU	77.27
33	PT. GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI	No group	99	HGU	7,292.01
34	PT. SAWIT SUMBER MAS SARANA	No group	99	HGU in process	7,394.11
35	PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI	No group	99	HGU	1,845.02
36	PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI	No group	99	HGU	2,172.79
37	PT. SATYA KISMA USAHA	Sinar Mas	68	HGU in process	695.85
38	PT. SATYA KISMA USAHA	Sinar Mas	68	HGU in process	5,896.75
39	PT. CIPTA NARADA LESTARI	No group	99	HGU in process	2,430.36
40	PT. SURYA SAWIT SEJATI	No group	99	HGU in process	3,275.33
41	PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI	No group	99	HGU	10,669.71
42	PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI	No group	99	HGU	5,731.21
43	PT. BUMI LANGGENG PERDANATRADA	No group	99	HGU	1,362.57

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	company	group_comp	groupid	type	luas_ha
44	PT. BUMI LANGGENG PERDANATRADA	No group	99	HGU	7,759.69
45	PT. RANA CENTRAL NUGRAHA	No group	99		2.99
46	PT. SAWIT MANDIRI LESTARI	No group	99		3,575.54
47	PT. NATAI SAWIT PERKASA	No group	99		13,155.90
48	PT. SAWIT SUMBER MAS SARANA	No group	99	HGU	12,696.39
49	PT. MENTHOBISAWIT JAYA	No group	99	HGU	431.19
50	PT. PERSADA BINA NUSANTARA PAGI	No group	99	HGU	4,509.93
51	PT. GUNUNG SEJAHTERA PUTI PESONA	No group	99	HGU	8,829.04
52	PT. GUNUNG SEJAHTERA YOLI MAKMUR	No group	99	HGU	4,384.97
53	PT. WANA SAWIT SUBUR LESTARI	No group	99	HGU	4,424.12
54	PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH	No group	99	HGU	8,575.78
55	PT. AGRO MENARA RAHMAT	No group	99	HGU	7,479.56
56	PT. Dagang Industri	No group	99	Ijin Lokasi	342.56
57	PT. Mitra Abadi Makmur Pratama	Mitra Jaya Group	43	Ijin Lokasi	19,819.83
58	PT. Rimba Karya Kalimantan	No group	99	Ijin Lokasi	5,072.43
59	PT. Persada Bina Nusantara Abadi	Astra International	5	HGU	2,620.71
60	PT. Subur Sawit	No group	99	Ijin Lokasi	647.17
61	PT. Subur Sawit	No group	99	Ijin Lokasi	2,310.42
62	PT. Meta Epsi Agro III	Medco Group	42	Ijin Lokasi	4,127.27
63	PT. Meta Epsi Agro III	Medco Group	42	Ijin Lokasi	835.56
64	PT. Cipta Narada Lestari	Astra International	5	Ijin Lokasi	30.43
65	PT. Wanaasri Fajarindo	No group	99	Ijin Lokasi	13,347.11
66	PT. Nusantara Upaya Bakti	No group	99	Ijin Lokasi	1,828.87
67	PT. Tapian Nadenggan	Sinar Mas	68	HGU	83.99

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	company	group_comp	groupid	type	luas_ha
68	PT. Sungai Rangit Kencana	No group	99	HGU	2,526.45
69	PT. Gemareksa Mekarsari	Indhasana Group	27	HGU	120.44

Sumber: Bappedalitbang 2021

## 2. KEGIATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

Jika dilihat dari produktifitas kegiatan usahanya, sebagian dari pelaku usaha yang bergerak di sector perkebunan juga memiliki unit industri pengolahan. Dari 31 perusahaan perkebunan aktif, 19 perusahaan diantaranya memiliki unit industri pengolahan yang memproduksi minyak mentah (CPO) dan Minyak inti sawit (CPKO) Hal ini seperti terlihat pada table berikut

Tabel 6 Kinerja Produksi Perusahaan Perkebunan dan Industri Pengolahan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Nama Perusahaan	KOMODITI/ PRODUK	PRODUKSI (TON)		
			Th. 2017	Th. 2021	Th. 2022
a	b	c	d	e	f
1	PT. GSIP	TBS	111,932.00	65,474.00	11,283.00
		CPO	72,230.00	42,646.00	6,544.00
		PKO	2,865.00	4,087.00	643
		Kernel	18,013.00	9,650.00	1,510.00
2	PT. Agro Menara Rahmat	TBS	245,557.00	89,698,340.00	42,276,700
		CPO	-	-	-
		PKO	-	-	-
		Kernel	-	-	-
3	PT. GSDI	TBS	319,988.58	-	90,307.80
		CPO	61,756.60	-	34,180.32
		PKO	2,708.56	-	-
		Kernel	13,478.43	-	7,855.93
4	PT. GSYM	TBS	174,091.69	45439730	14,120,366.41
		CPO	-	32,372.28	32,372.28
		PKO	-	-	-
		Kernel	-	-	-
5	PT. GSPP	TBS	296,870.00	-	29,902,780.00
		CPO	54,846.00	-	20,435,320.00
		PKO	2,892,090.00	-	-
		Kernel	11,731.00	-	3,449,980.00
6	PT. P.B.N.A	TBS	40,005,555.88	32,982.00	6,144.00
		CPO	-	-	-
		PKO	-	-	-

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Nama Perusahaan	KOMODITI/ PRODUK	PRODUKSI (TON)		
			Th. 2017	Th. 2021	Th. 2022
		Kernel	-		-
7	PT. SINP	TBS	133,648,650.00	107,592.00	19,887.00
		CPO	53,304,090.00		8,786.00
		PKO	3,690.00		-
		Kernel	12,507,730.00	10,552.00	2,026.00
8	PT. CITRA BORNEO INDAH(P. ESTATE)	TBS		24,565.00	27,007.00
		CPO			8,697.00
		PKO			-
		Kernel			-
9	PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA	TBS	495,269.00	481,247.00	593,247.00
		CPO	141,549.00	109,050.00	125,983.00
		PKO			-
		Kernel	22,237.00	22,456.00	31,307.00
10	PT. KSA	TBS	124,468.00	141,949.00	149,340.00
		CPO	40,295.00	38,378.00	45,999.00
		PKO			-
		Kernel	5,529.00	8,171.00	11,654.00
11	PT. MITRA MENDAWAI SEJATI	TBS	215,195.00	207,747.00	253,537.00
		CPO	54,582.00	48,803.00	63,854.00
		PKO	9,502.00	22,359.00	17,978.00
		Kernel	8,212.00	11,150.00	14,136.00
12	PT. SURYA SAWIT SEJATI	TBS		215,062.98	56,571,845.87
		CPO		47,315.65	35,609,940.26
		PKO			-
		Kernel		9,677.69	5,229,286.19
13	PT. BUMI LANGGENG	TBS	210,918,450.00	29,991.00	28,961.00
		CPO	49,141,593.00		-
		PKO			-
		Kernel	8,853,734.00		-
14	PT. EAGLE HIGH PLANTAION	TBS			20,512.00
		CPO		35,551.04	-
		PKO			-
		Kernel			3,799.00
15	PT. WANA SAWIT	TBS	220,975.67	321,042.89	68,772.40
		CPO	47,851.63	62,311.88	-
		PKO	9,778.36	18,652.14	-
		Kernel	10,191.35	14,083.96	-
16	PT. BJAP	TBS	273,399.85	279,610.60	-
		CPO	57,845.36	61,180.18	-
		PKO	8,933.96	6,037.78	-
		Kernel	11,252.65	12,271.57	-
17	PT. BUMITAMA	TBS		434,975.00	465,097.00

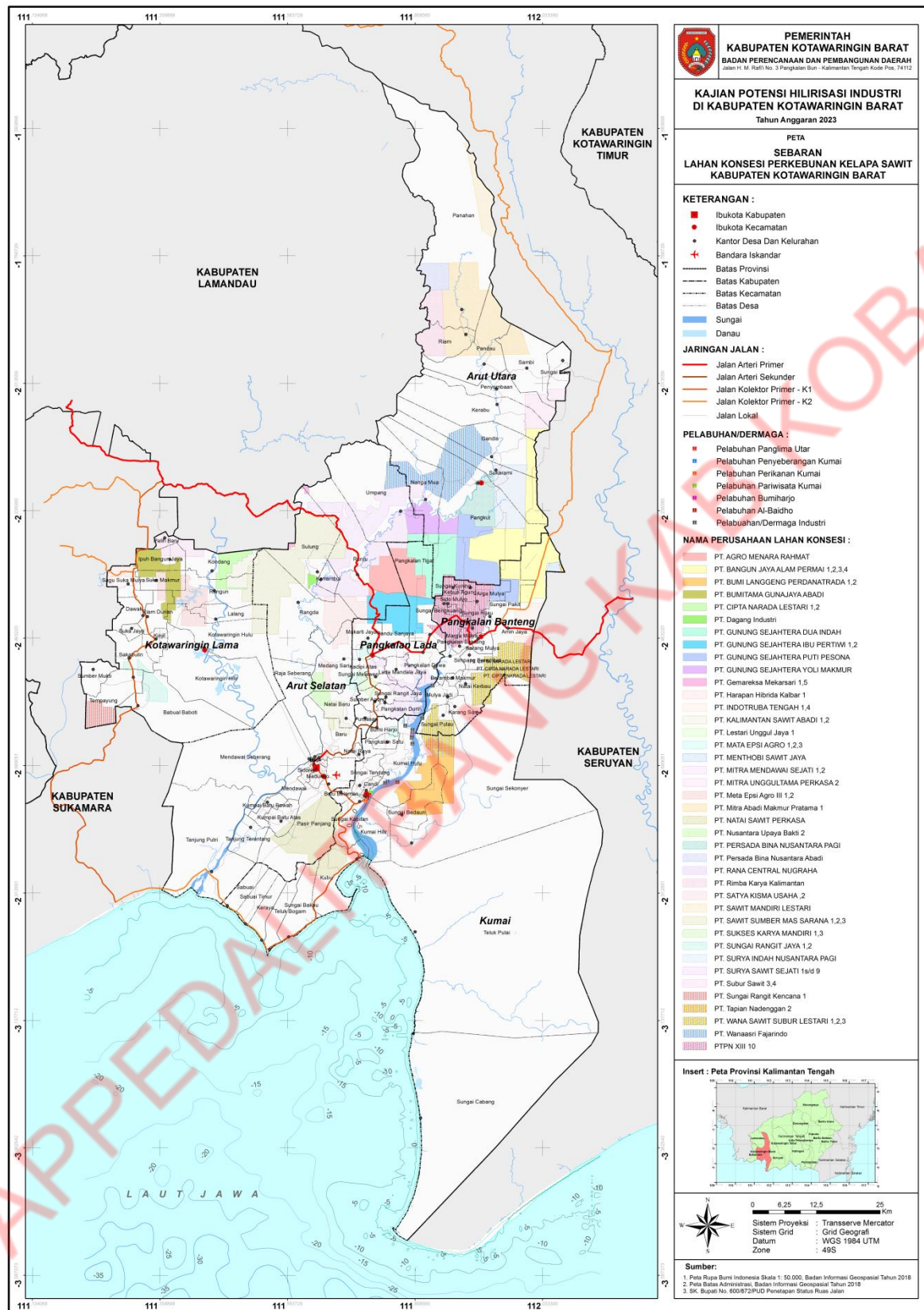
**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Nama Perusahaan	KOMODITI/ PRODUK	PRODUKSI (TON)		
			Th. 2017	Th. 2021	Th. 2022
	GUNA JAYA ABADI	CPO		115,262.00	230,186.00
		PKO			-
		Kernel		26,173.00	54,832.00
18	PT. ANDALAN SUKSES MAKMUR	TBS		34,137.00	39,589.00
		CPO			-
		Kernel			-
20	PT. USAHA AGRO INDONESIA	TBS		1,564.00	-
		CPO			-
		Kernel			-
21	PT. SUNGAI RANGIT	TBS	347,472,610.00	51,679.38	344,272,222.00
		CPO	71,241,178.00	10,652.34	90,807,383.00
		Kernel	14,879,264.00	2,425,969.00	9,786,005.00
22	PT. SATYA KISMA USAHA	TBS	50,183.07	45,926.00	50,352.00
		CPO	10,862.31	9,366.00	10,104.00
		Kernel	3,006.50	2,702.00	3,080.00
23	PT. PRIMA SENTOSA PRATAMA PUTRA	TBS	9,494.13	7,931.00	6,326.00
		CPO	2,056.77	1,620.00	1,488.00
		Kernel	571.36	468	453
24	PT. ARUT SAWIT MANDIRI	TBS	1,656,095.00	8,109.00	8,091.00
		CPO			-
		Kernel			-
27	PT. INDO TRUBA TENGAH	TBS	128,301.00	107,743.00	107,743.00
		CPO	27,234.00	24,078.00	24,078.00
		Kernel	688.57	4,632.00	4,632.00
29	PT. PALMA AGRO INDO MANDIRI	TBS		54,469.00	103,669.00
		CPO		100.05	7,988.02
		Kernel		5,190.17	11,673.00
30	KUD . TANI SUBUR	TBS			14,733,092.00
		CPO			-

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Nama Perusahaan	KOMODITI/ PRODUK	PRODUKSI (TON)		
			Th. 2017	Th. 2021	Th. 2022
		PKO			-
		Kernel			-
31	PT. NAL	TBS	157,687.00		
		CPO	18,958.00		
		PKO			
		Kernel	4,448.00		

# DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 11 Sebaran Lahan Konsesi Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---



**Gambar 12 Situasi dan Kondisi Kawasan Perkebunan dan Industri Pengolahan PT. BGA**



**Gambar 13 Situasi dan Kondisi Kawasan Perkebunan dan Industri Pengolahan PT. SSS**



### **3. INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PELABUHAN**

Pelabuhan merupakan salahsatu infrastruktur utama dalam kegiatan perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kondisi geografis wilayah yang dipengaruhi oleh struktur alam berupa jalur/jaringan sungai menjadikan aksesibilitas transportasi air menjadi pilihan utama yang efisien.

Beberapa perusahaan yang berlokasi tidak jauh dari tepian sungai seperti halnya Citra Borneo Group, PT. Sinar Alam Permai (Wilmar Group), PT. Kapuas Prima Coal mengembangkan dermaga/terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). Perusahaan lain yang tidak memiliki TUKS tetap dapat melakukan aktifitas distribusi ke luar wilayah melalui Pelabuhan Bumiharjo yang dikelola oleh Pelindo. Fasilitas pendukung yang dimiliki pelabuhan Bumiharjo antara lain Dermaga Curah Cair, Area Terminal Container, fasilitas Storage (tangki penyimpanan material cair). Kondisi dan situasi kawasan pelabuhan Bumiharjo dapat dilihat pada gambar



Gambar 14 Kondisi dan situasi kawasan pelabuhan Bumiharjo

**BAB 4**  
**ANALISIS**



## **1. KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**

Analisis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang khususnya yang terkait dengan kegiatan perkebunan dan industri pengolahan dilakukan melalui proses pengolahan data spasial secara bertahap, tahap 1, overlay peta konsensi perkebunan terhadap penetapan rencana kawasan perkebunan (PK. RTRW). Tahap ke 2 overlay dilakukan pada peta konsensi perkebunan dengan SK Penetapan Kawasan Hutan. Tahap ke 3, overlay dilakukan secara lebih detail yaitu area konsensi perkebunan tiap perusahaan dengan SK Kawasan Hutan

- a. Overlay peta (*Shapefile*) area konsensi perkebunan dengan Rencana kawasan perkebunan yang ditetapkan dalam dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan lampiran data spasial rencana pola ruang yang termuat dalam dok. PK RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, luas kawasan perkebunan mengalami kenaikan dari 145.203 hektar (perda 1/2018) menjadi 181.028 hektar. Dalam muatan dok. PK RTRW, Konsepsi pengembangan kawasan perkebunan dalam hutan sudah tidak lagi dilakukan karena memiliki potensi melanggar ketentuan perundangan di atasnya (PP Penyelenggaraan Kehutanan).

Alokasi luas rencana kawasan perkebunan yang cenderung lebih kecil dibanding area konsensi perkebunan, tentu menimbulkan terjadinya potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang. Dari luas area konsensi perkebunan yang mencapai 250.276 hektar, hanya 98.208 hektar (39,4%) yang masuk dalam delineasi rencana kawasan perkebunan.

- b. Overlay peta (*Shapefile*) area konsensi perkebunan dengan SK 6627/2021 Tentang Penetapan Kawasan Hutan di Prov. Kalimantan Tengah

Sebagaimana diketahui pada proses overlay sebelumnya, masih terdapat 60,76% area konsensi perkebunan yang berada diluar penetapan kawasan perkebunan. Dari luas tersebut selanjutnya dioverlay kembali dengan SK penetapan kawasan hutan, hasilnya menunjukkan bahwa sisa area konsensi perkebunan mengalami tumpang tindih terhadap area taman nasional (230,59 hektar), Hutan Produksi tetap (74.182 hektar), Hutan Produksi yang dapat dikonversi (59.778 hektar)

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

Tabel 7 Area Konsesi Perkebunan Terindikasi Masuk Kawasan Hutan

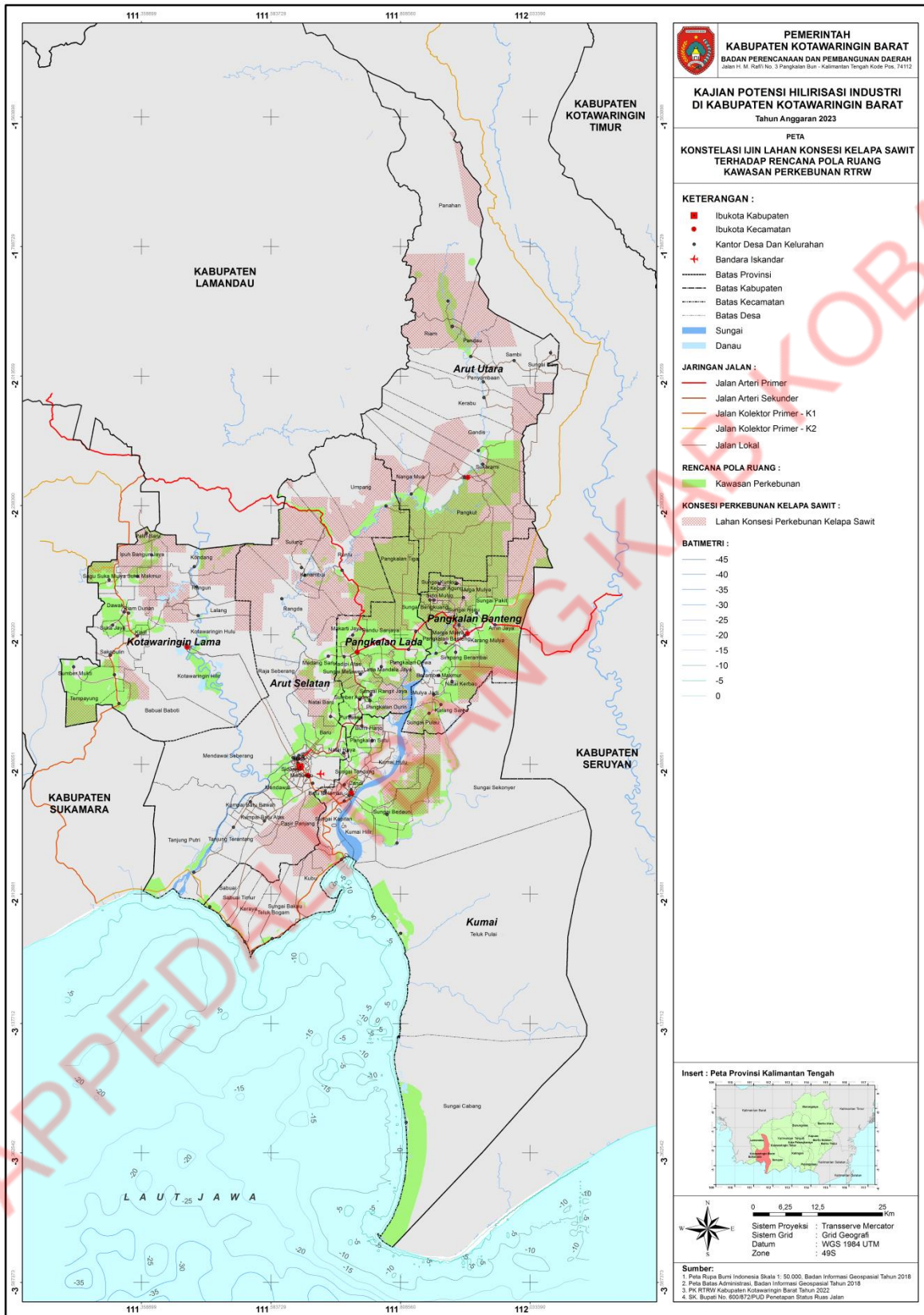
NO	FKH_2020	KETERANGAN	LUAS HA
1	10024	Taman Nasional (TN)	230.59
2	1003	Hutan Produksi Tetap (HP)	74,182.42
3	1005	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	59,778.19
4	1007	Areal Penggunaan Lain (APL)	111,733.89
5	5003	Tubuh Air	387.60
			<b>246,312.69</b>

Sumber: Hasil Analisa

c. Overlay Unit Konsesi Perusahaan Terhadap SK Kawasan Hutan

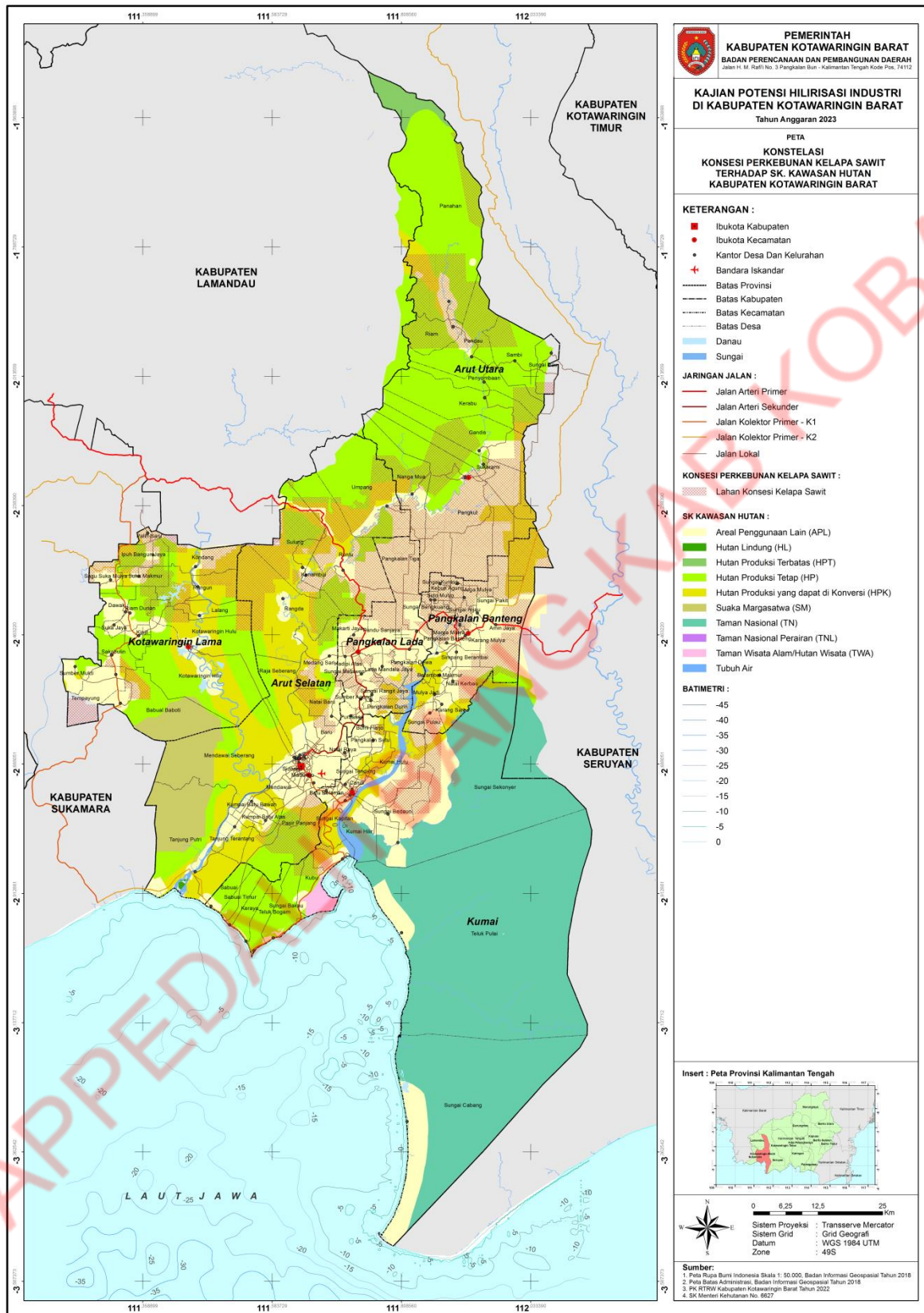
Overlay unit konsesi perusahaan terhadap SK Kawasan Hutan dilakukan untuk mengetahui secara detail potensi tumpang tindih kegiatan usaha perkebunan pada masing-masing pelaku usaha. Hal tersebut secara spesifik diuraikan pada table berikut

# DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 15 Analisis Lokasi Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Rencana Penetapan Kawasan Perkebunan (PK. RTRW Kab. Kotawaringin Barat)

# DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

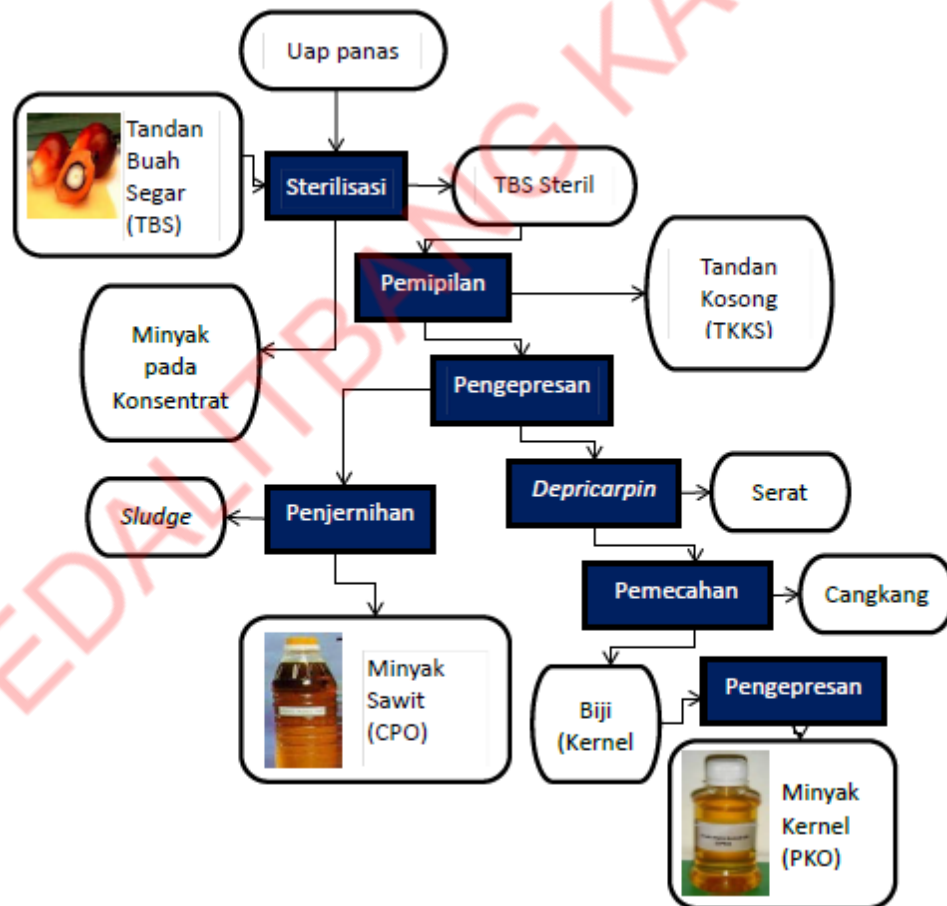


Gambar 16 Analisis Posisi Konsesi Perkebunan Terhadap SK Penetapan Kawasan Hutan

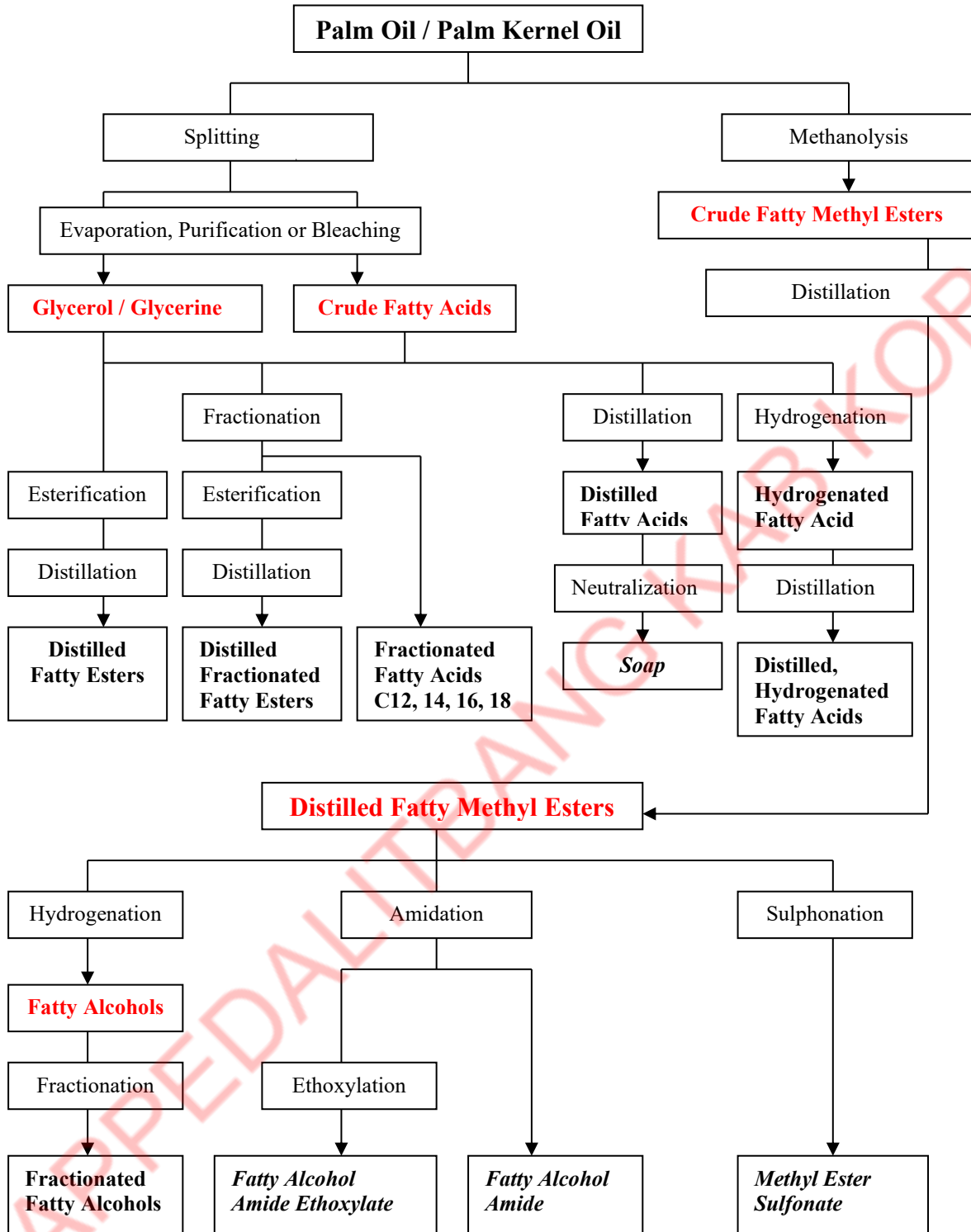
## 2. ANALISIS PRODUK INDUSTRI TURUNAN

Analisis produk industri turunan yang dapat dihasilkan dari kegiatan pengolahan kelapa sawit dapat diketahui berdasarkan rangkaian proses baik secara biologic-kimia-fisika.

Teknologi pengolahan minyak kelapa sawit dapat dibedakan atas proses upstream dan downstream. Teknologi pengolahan upstream adalah proses pengolahan minyak kelapa sawit dari tandan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit (Gambar 12), sedangkan teknologi pengolahan downstream adalah proses pengolahan minyak sawit menjadi produk lanjutan untuk produk pangan (oleofood) maupun produk non pangan (oleokimia dan bioenergi), Lihat Gambar 17

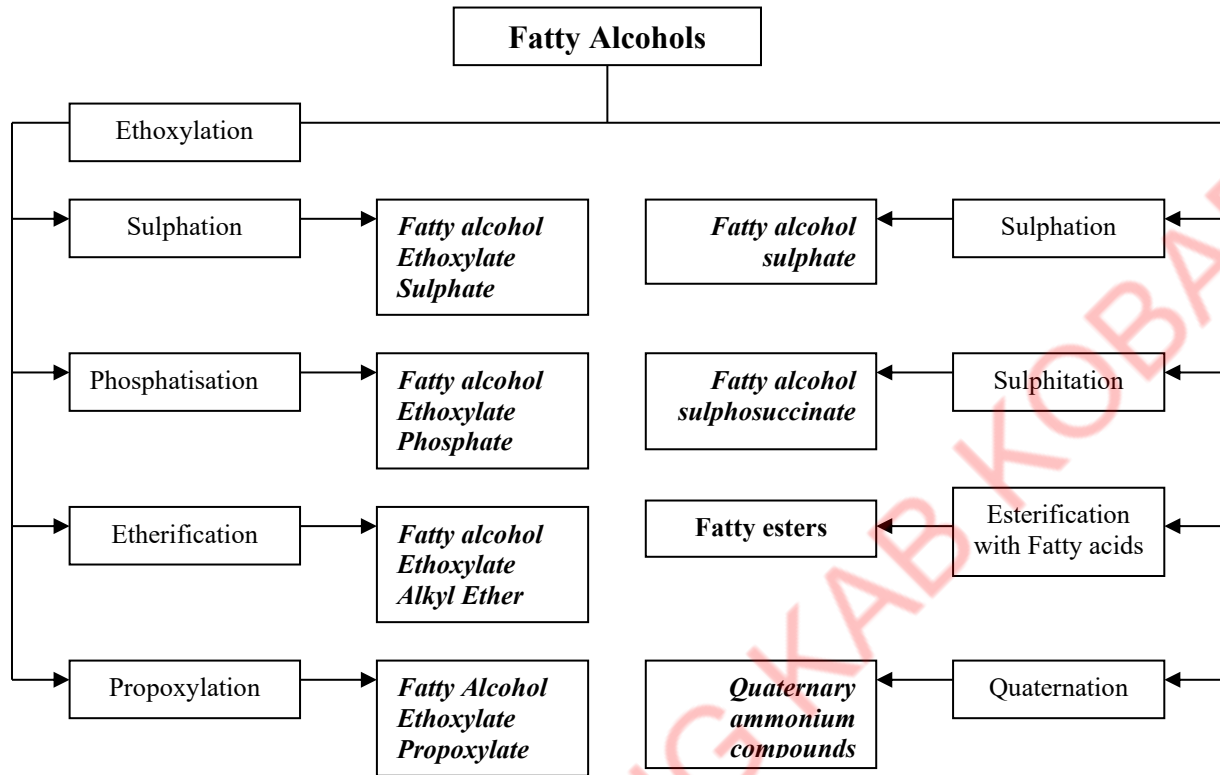


Gambar 17 Proses Pengolahan Kelapa Sawit Secara Upstream Menghasilkan CPO dan CPKO



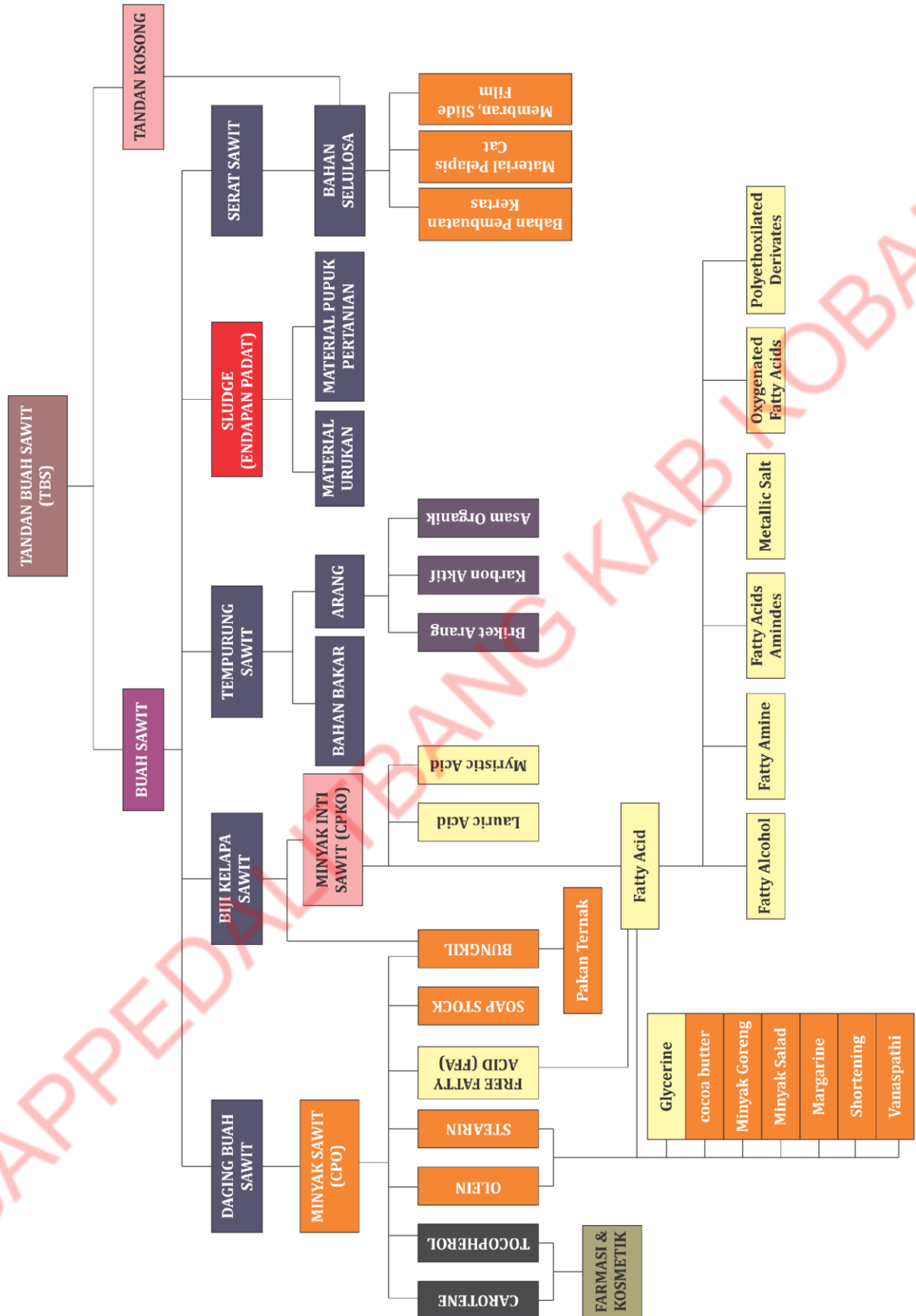
Gambar 18 Diagram Proses Downstream CPO/CPKO Menghasilkan produk Oleokimia





Gambar 19 Diagram Proses Downstream Pengolahan Fatty Alcohols

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Gambar 20 Produk Turunan (diversifikasi) Industri Kelapa Sawit

### **3. KENDALA DALAM RANTAI PASOK INDUSTRI PENGOLAHAN**

Analisis kendala dalam Rantai Industri Pengolahan Kelapa Sawit dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh beberapa perwakilan pelaku usaha yang hadir pada saat FGD Laporan Pendahuluan dan FGD Laporan Antara. Problem rantai pasok antara lain

a. Kerusakan Jalan

Sebagian besar akses utama kawasan perkebunan memiliki karakteristik perkerasan jalan berupa macadam (tanah yang dipadatkan). Pada musim hujan, Kondisi tersebut menjadi persoalan yang serius karena kondisi jalan tidak dapat dilintasi oleh kendaraan angkutan TBS (tandan buah segar) yang bermuatan berat. Persoalan tersebut seringkali mengganggu siklus produksi dalam industri pengolahan. Material TBS seringkali mengalami keterlambatan untuk diproses

b. Pendangkalan Alur Sungai

Kondisi pendangkalan alur utama kumai mengakibatkan operasi pengiriman CPO dan produk turunan lainnya melalui kapal menjadi terkendala. Berdasarkan data batimetri nasional, draf kedalaman alur kumai rata-rata didominasi pada level kedalaman 6 meter. Pada kondisi kedalaman tersebut draf kapal yang dapat melintas secara aman terbatas pada kapal dengan kapasitas 5000 DWT.

Dengan besarnya tuntutan volume material CPO yang harus diangkut, kondisi tersebut mengakibatkan proses loading CPO dilakukan secara ship to ship. Pelaku usaha yang tidak memiliki armada angkut tentu akan mengalami dampak pada peningkatan biaya angkut/transportasi

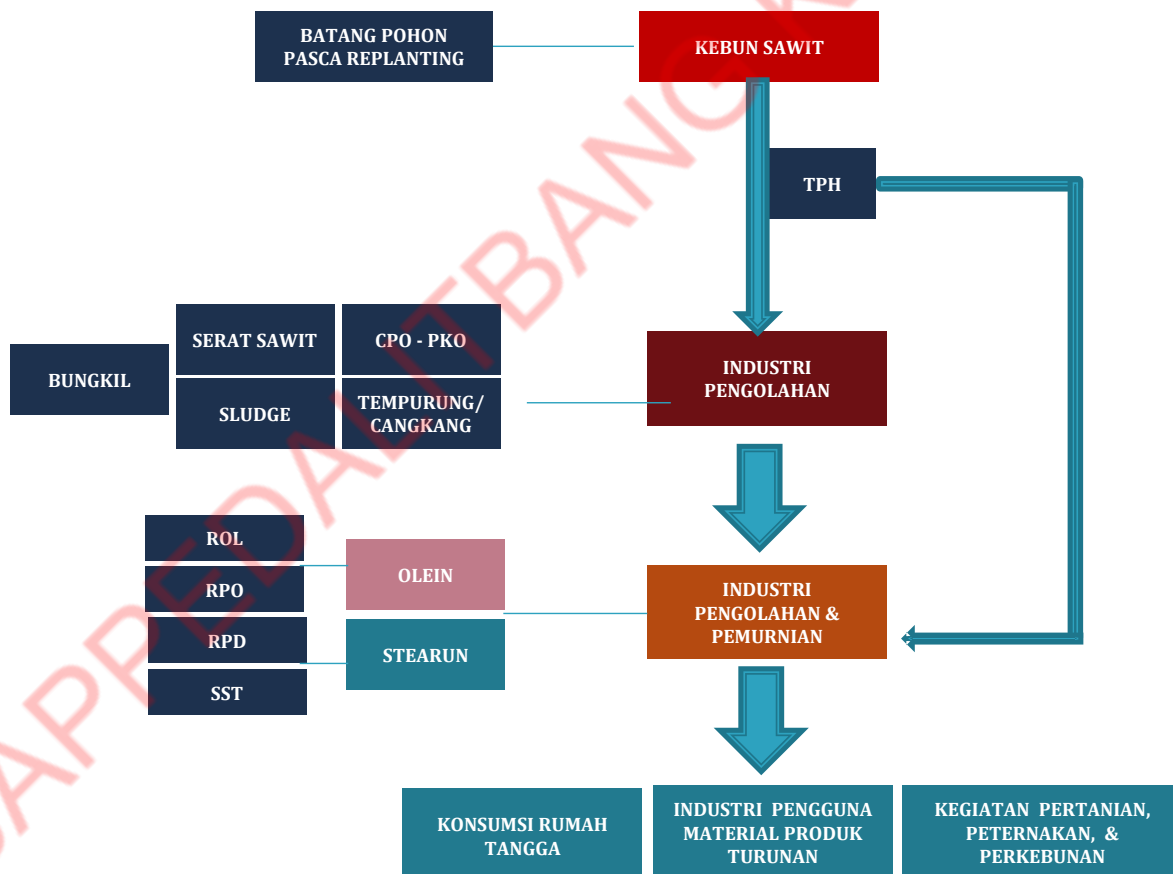
c. Ketersediaan TBS dan produktifitas perkebunan

Ketersediaan Tandan Buah Segar (TBS) yang menjadi material utama industri pengolahan CPO sangat mempengaruhi siklus produksi industri pengolahan (refinery). Pada periode tertentu, ketersediaan TBS mengalami keterbatasan stok, industri pengolahan yang tidak memiliki kebun sendiri tentu akan mengalami kendala dalam proses produksi

**4. ALIRAN RANTAI PASOK & KETERKAITAN ANTAR INDUSTRI PENGOLAHAN**

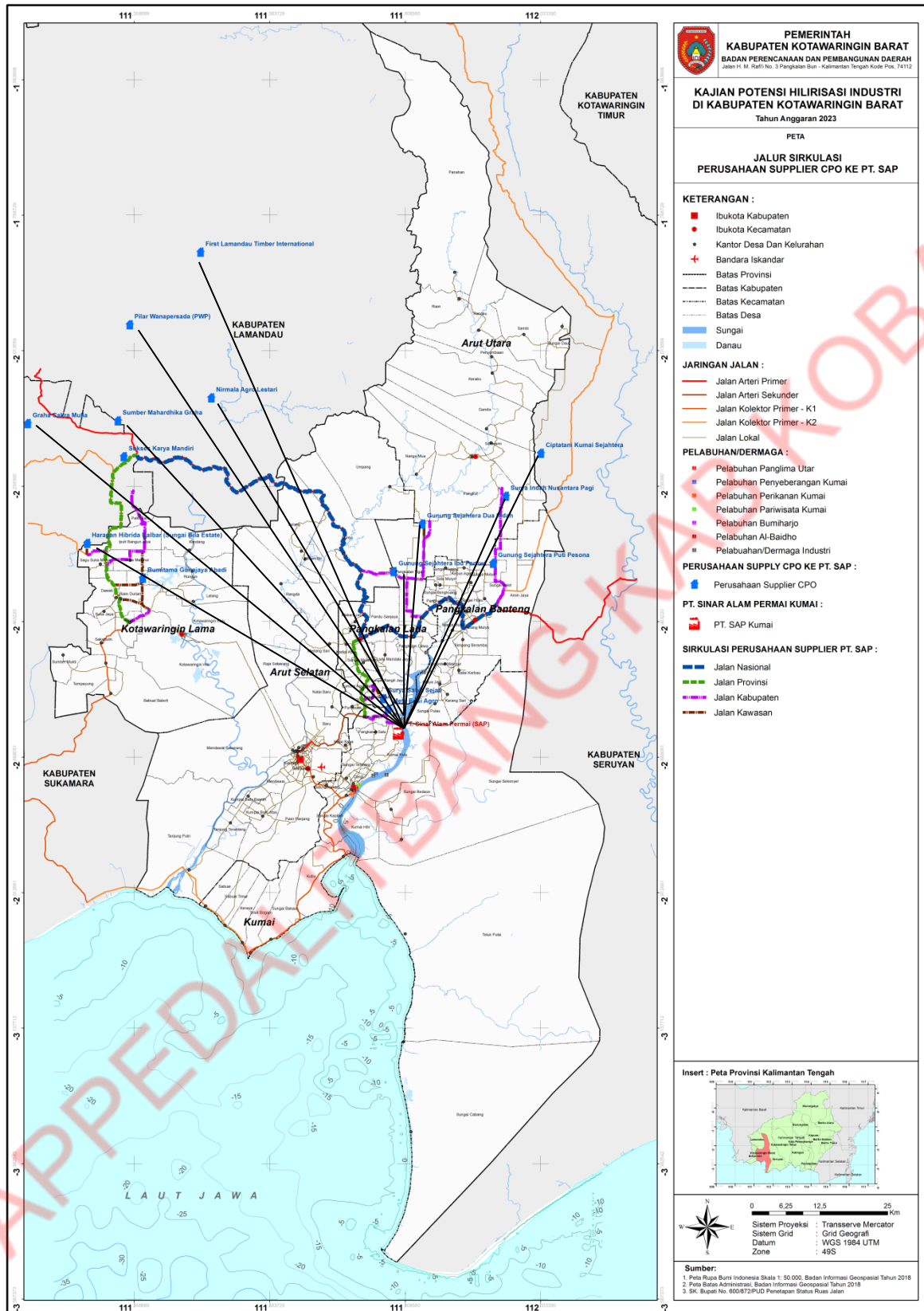
Keterkaitan antara industri pengolahan berbasis kelapa sawit di Kotawaringin Barat dapat diketahui berdasarkan pola aliran rantai pasok industri utama. Industri pengolahan yang memiliki teknologi proses yang terbatas/sederhana seringkali memegang peranan sebagai industri pendukung yang menyediakan pasokan berupa CPO bagi industri pengolahan yang lebih kompleks.

Salahsatu perusahaan yang menjadi pusat aliran CPO dari industri pengolahan di Kotawaringin Barat adalah PT. Sinar Alam Permai yang merupakan bagian dari Wilmart Group. Dari data yang diperoleh melalui situs resmi perusahaan, terdapat setidaknya 19 perusahaan yang mensupply CPO PT. SAP. Seperti diketahui bersama, PT. SAP menjadi salahsatu perusahaan yang memproduksi Produk Turunan CPO berupa RBDPO, RBD Olein, RBD Stearin.



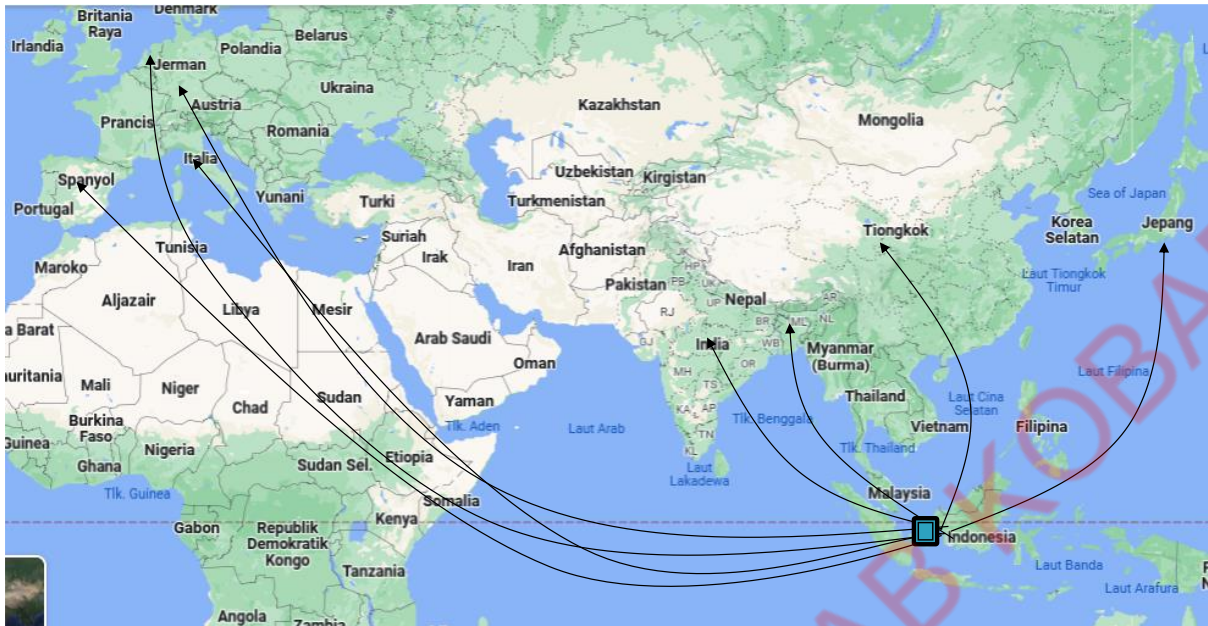
Gambar 21 Skema Pola Aliran Rantai Pasok Industri Pengolahan Kelapa Sawit

# DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 22 Analisis Pola Aliran Rantai Pasok PT. SAP Di Kotawaringin Barat

## DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 23 Aliran Eksport Material CPO & Produk Turunan Lain dari Kalimantan Tengah

### 5. KETERKAITAN DAN ASPEK PERMINTAAN

Meski secara kuantitatif data aspek permintaan cenderung bersifat eksklusif dan tidak mudah diperoleh secara terbuka, Analisis terhadap aspek permintaan akan CPO dan produk turunan lainnya dapat dilakukan dengan mengidentifikasi ekosistem industri yang terhubung karena factor pasokan material.

Industri yang memiliki material utama dari produk CPO maupun produk turunannya secara umum dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori seperti yang termuat dalam table berikut

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Tabel 8 Ekosistem Industri Pada Produk CPO dan Turunan Lainnya

No	Jenis Industri	Jenis Produk	Proses Produk Turunan Sawit	Produsen
A	industri makanan	Edible surfactan	proses fatty alcohol	
1	industri margarin	olein & stearin, surfactan	refinery bleached deodorized palm oil, proses fatty alcohol	PT. SMART tbk, PT. SIMP tbk
2	industri es krim	sortening, fp	refinery bleached deodorized palm oil	PT CAMPINA, PT. Yili Indonesia Dairy
3	industri pakan ternak	bungkil sawit	proses pengolahan bungkil sawit	PT Buana Karya Noveltindo, PT. Wilmart Nabati Indonesia
4	industri susu	tochoferol, tochtrienol, surfactan	refinery bleached deodorized palm oil, proses fatty alcohol	PT. Nestle Indonesia
5	industri roti	sortening	refinery bleached deodorized palm oil	PT. Nippon Indosari
B	industri kosmetik (produk facial, pelembab)	surfactan, glycerin, tochoferol, tochtrienol, lauryc acid, mysteric acid	proses fatty alcohol, refinery bleached deodorized palm oil	PT. Paragon Technology and Innovation
C	industri tekstil (produk pelembut kain)	surfactan,	proses fatty alcohol	PT. Panasia Indo Resources Tbk, PT. Sritex
D	industri sabun, detergen & pembersih (produk sabun cuci, pembersih lantai, shampo)	surfactan, mes	proses fatty alcohol	PT. Unilever Indonesia, PT. Wing
E	industri pelumas (produk pembersih mesin, cairan pelumas mesin)	surfactan	proses fatty alcohol	PT. Pertamina Lubricant
F	industri farmasi/obat	tochoferol, tochtrienol, lauryc acid, mysteric acid	refinery bleached deodorized palm oil	

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Jenis Industri	Jenis Produk	Proses Produk Turunan Sawit	Produsen
G	industri pertanian (pupuk cair organik, cairan obat disinfektan )	qac/garam ammonium	proses fatty alcohol, proses sludge	
H	industri kayu olah (cairan pengawet kayu)	qac/garam ammonium	proses fatty alcohol	
I	industri filtrasi dan penjernihan air	qac/garam ammonium,		
J	industri cat	qac/garam ammonium, plasticizer range alcohol	proses fatty alcohol	PT. Avia Avian,
K	industri pipa & material pvc	plasticizer, polycarboxylic acid	proses fatty alcohol	PT. Maspion, PT. Spindo

Sumber: Hasil Analisis



## **6. INDUSTRI TURUNAN PRIORITAS**

Penetapan industri turunan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada 2 (dua) pertimbangan utama

### **a. Klausul Investasi**

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh perwakilan PT. Surya Borneo, selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan industri terdapat investor yang saat ini sedang melakukan penjajakan untuk membangun pabrik fatty alcohols dan biodiesel.

Seperti diketahui bahwa Fatty Alcohol merupakan downstream dari Fatty Acyd yang menghasilkan produk-produk utama dalam ekosistem industri berbahan baku CPO & turunan lainnya. pembangunan pabrik Fatty Alcohol setidaknya akan menghasilkan beberapa produk antara lain

- 1) Fatty alcohol Ethoxylate Sulphate
- 2) Fatty alcohol Ethoxylate Phosphate
- 3) Fatty alcohol Ethoxylate Alkyl Ether
- 4) Fatty alcohol sulphate
- 5) Fatty alcohol sulphosuccinate
- 6) Fatty esters Quaternary
- 7) Ammonium compounds

Dibanding dengan Fatty Alcohol, Pembangunan pabrik biodiesel di Kotawaringin Barat dinilai cukup berat karena beberapa catatan antara lain

- 1) Materi katalisator harus didatangkan dalam jumlah besar dari luar wilayah Kalimantan Tengah
- 2) Pemasaran produk biodiesel tidak bersifat bebas, dipengaruhi oleh peraturan perundangan yang ketat
- 3) Aplikasi Teknologi yang menuntut kebutuhan biodiesel cenderung terbatas

b. Kebutuhan Wilayah

Industri turunan yang dihadirkan atas dasar kebutuhan wilayah adalah pengolahan material biomassa seperti pupuk cair, gula merah, malam untuk bahan dasar membatik dan Furnitur dari batang sawit.



Gambar 24 Prospek dan Peluang Pengolahan Batang Pohon Sawit Menjadi Gula Merah



Gambar 25 Prospek dan Peluang Pengolahan Batang Pohon Kelapa Sawit Menjadi Produk Furniture & Aneka Asesori Lainnya



Gambar 26 Prospek dan Peluang Pengolahan cangkang dan steiring menjadi malam untuk Batik



Gambar 27 Prospek dan Peluang Biomassa dan Limbah Kelapa Sawit Menjadi Pupuk Organik & Pupuk Cair

Keunggulan komparatif yang dimiliki Kotawaringin Barat sebagai sentra produksi Kelapa Sawit sangat penting, dengan material bahan baku yang melimpah, biaya produksi dari upaya pengelolaan material biomassa dapat dilakukan secara ekonomis. Pelaku UMKM yang sebelumnya diabaikan dalam ekosistem industri perkebunan dan industri kelapa sawit, kini memiliki peluang dan ruang lingkup usaha yang luas

## 7. SIMBIOSA DALAM EKOSISTEM PERKEBUNAN DAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

Kegiatan perkebunan yang bersinggungan dengan kawasan hutan seringkali dipandang negative oleh dunia internasional karena aktifitasnya memiliki resiko intervensi terhadap lingkungan yang sangat besar dan intens beberapa resiko yang seringkali dijumpai antara lain

- a. penyiapan lahan yang dilakukan secara parsial dan tidak terencana dengan baik (membakar, Merusak/memotong tegakan vegetasi yang sudah ada)
- b. Membunuh dan memburu satwa liar dilindungi yang berpotensi melintas
- c. Mengancam ketersediaan pasokan air tanah

Menyikapi stigma diatas, pelaku usaha disektor perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit perlu merubah paradig lama dan menempatkan lingkungan sebagai penyedia jasa ekosistem yang kompleks. Hal ini tentu bukan sebuah retorika atau teori yang menuntut biaya tinggi dan sulit untuk diimplementasi.

Penataan lanskap perkebunan yang didasarkan pada identifikasi elemen lingkungan yang memiliki nilai konservasi tinggi, tentu memberikan keuntungan jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan sumberdaya alam hayati. Perusahaan dapat mendapat manfaat jasa ekosistem dan penilaian rekam jejak yang baik di dunia usaha perkebunan.

Salahsatu pilot project penataan lanskap perkebunan yang didasarkan pada Nilai Konservasi Tinggi adalah kawasan Perkebunan PT. SSS. Komposisi lanskap ruang di kawasan PT. SSS cenderung adaptif, hal ini terlihat dari adanya Boezem sebagai ruang penampungan dan konsevasi air, area penanganan satwa liar. aplikasi pembersihan rumput/gulma disekitar perkebunan dengan melepas liarkan Sapi dan Rusa, program penyelamatan vegetasi langkah yang terdampak pembukaan lahan. Langkah pengelolaan yang telah diterapkan oleh PT. SSS tentu menjadi pelajaran berharga (lesson & learned) bagi model pengelolaan kawasan perkebunan dimasa mendatang



Gambar 28 Simbiosis Dalam Sistem Konservasi Sumberdaya Alam Hayati di Perkebunan Sawit

## 8. SWOT

Menurut Drs. Robert Symbolon, MPA (1999), analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam lingkungan internal dan eksternal ini pada dasarnya terdapat empat unsur yang selalu dimiliki dan dihadapi, yaitu secara internal memiliki sejumlah kekuatan-kekuatan (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*), dan secara eksternal akan berhadapan dengan berbagai peluang-peluang (*opportunities*) dan ancaman-ancaman (*threats*).

Pengertian-pengertian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut :

■ **Kekuatan (*strengths*)**

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar suatu perusahaan (Amin W.T, 1994:75). Kekuatan adalah modal potensial yang dapat berupa **instrument kebijakan, daya dukung infrastruktur, sumberdaya alam maupun SDM suatu kawasan.**

■ **Kelemahan (*weaknesses*)**

Kelemahan adalah keterbatasan/kekurangan yang dimiliki oleh suatu kawasan/wilayah dapat berupa **kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi keterbatasan infrastruktur, kemampuan manajerial/pengelolaan.**

■ **Peluang (*opportunities*)**

Peluang adalah situasi/kecenderungan utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan (Amin W.T, 1994:74) Peluang adalah **situasi/kecenderungan utama yang menguntungkan untuk pengembangan sektor kegiatan** akibat faktor tertentu seperti aglomerasi ekonomi.

■ **Ancaman (*threats*)**

Ancaman adalah **situasi/kecenderungan utama yang tidak menguntungkan untuk pengembangan sektor kegiatan tertentu seperti halnya ketidasesuaian kegiatan terhadap skenario pembangunan kota.**

Data yang akan dijadikan input dalam matrik strengths (kekuatan-kekuatan), weaknesses (kelemahan-kelemahan), opportunities (peluang-peluang) dan threats (ancaman-ancaman) diperoleh melalui survey primer (pengamatan, kuesioner dan wawancara) dan survey sekunder (data kuantitatif dan kualitatif). Analisis SWOT terhadap kondisi wilayah perencanaan secara spesifik dapat dilihat pada matriks berikut

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Tabel 9 Matriks Analisis SWOT Di Wilayah Perencanaan

<b>ANALISIS SWOT</b>	<p><b>STRENGTH (KEKUATAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotawaringin Barat menjadi salahsatu kabupaten yang ditetapkan sebagai lokasi kawasan perkebunan nasional (sentra produksi komoditi kelapa sawit)</li> <li>2. Terdapat Anchor perusahaan perkebunan dan industri pengolahan sawit yang memiliki reputasi dalam lini bisnis komoditi sawit dunia (Wilmar Group, Smart, Astra)</li> <li>3. Terdapat kawasan industri Surya Borneo yang menjadi salahsatu bagian dari Major Project pemerintah pusat</li> <li>4. Terdapat infrastruktur pelabuhan bumiharjo yang memiliki fasilitas bongkar muat material curah cair. Pelabuhan bumiharjo menjadi salahsatu hub yang ditetapkan sebagai simpul distribusi hasil komoditi kelapa sawit</li> </ol>	<p><b>WEAKNESS (KELEMAHAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produktifitas perkebunan yang berada dibawah standar perkebunan nasional</li> <li>2. Ketidakseimbangan aliran sistem bisnis logistic (keluar-masuk barang) mengakibatkan biaya logistic antar wilayah menjadi tinggi</li> <li>3. Kedalaman alur pelayaran kumai cenderung dangkal, hanya dapat diakses oleh kapal dengan kapasitas 5000 DWT</li> <li>4. Belum semua perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah</li> <li>5. Overlapping lokasi izin usaha perkebunan dengan sk penetapan kawasan hutan.</li> <li>6. Lingkup kegiatan usaha industri pengolahan kelapa sawit didominasi oleh kegiatan dengan output minyak mentah (CPO DAN CPKO)</li> </ol>
<p><b>OPPORTUNITY (PELUANG)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya Permintaan Pasar Ekspor Terhadap Komoditi CPO</li> <li>2. Meningkatnya kebutuhan industri dalam negeri</li> </ol>	<p><b>MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Fasilitas Dan Ruang Akomodasi yang memungkinkan komunikasi bisnis, kerjasama korporasi dapat berjalan efektif dan lebih produktif</li> </ol>	<p><b>MEMANFAATKAN PELUANG UNTUK MENGATASI KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan revitalisasi terhadap sentra perkebunan rakyat dan perkebunan swasta yang mengalami penurunan produksi</li> <li>2. Melakukan fasilitasi dan pembinaan teknis</li> </ol>

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

<p>terhadap komoditi CPO dan turunannya</p> <p>3. Munculnya kegiatan pendukung dan kegiatan inti dari diversifikasi produk kelapa sawit yang dapat menyerap banyak tenaga kerja</p>	<p>2. Membangun kawasan industri dan cluster cluster industri baru disekitar lokasi perkebunan dan industri yang sudah ada agar manajemen rantai lebih efisien</p> <p>3. Membangun koneksitas infrastruktur antara kawasan industri dan cluster industri dengan kawasan ekonomi khusus</p> <p>4. Mendorong kesepakatan bersama antar daerah yang berbatasan dengan kotawaringin barat untuk meningkatkan produktifitas komoditi perkebunan kelapa sawit untuk menjamin ketersediaan rantai pasok industri</p> <p>5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan perkebunan khususnya yang terkait dengan fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha perkebunan rakyat</p>	<p>kepada kelompok dan pelaku usaha perkebunan rakyat tentang tata kelola usaha perkebunan yang efektif dan efisien</p> <p>3. Mengkaji sistem pengangkutan/distribusi komoditi cpo yang efisien</p> <p>4. Melakukan pemeliharaan terhadap alur utama pelayaran kumai dan rawa pasangsurut untuk mendukung keamanan lalu lintas pelayaran</p> <p>5. Penambahan sarana bantu navigasi pelayaran di area masuk alur, dan area labuh kapal</p> <p>6. Memberikan fasilitasi dan pembinaan teknis kepada pelaku usaha perkebunan dan industri pengolahan untuk menerapkan pengelolaan kegiatan usaha yang ramah lingkungan</p> <p>7. Melakukan verifikasi dan fasilitasi teknis kegiatan usaha yang lokasi usahanya berada dalam kawasan hutan (pemenuhan syarat proses pelepasan kawasan hutan)</p>
---	---	--



**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

<b>THREAT (GANGGUAN/ANCAMAN)</b>	<b>MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENGATASI ANCAMAN</b>	<b>MENGHINDARI ANCAMAN TERKAIT KELEMAHAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan larangan ekspor produk CPO</li> <li>2. Kegiatan usaha perkebunan dan industri yang berada dalam penetapan kawasan hutan mengalami kendala proses legalitas dan perolehan sertifikasi produk secara internasional</li> <li>3. Gangguan distribusi komoditi akibat pendangkalan alur sungai</li> <li>4. Tingginya biaya produksi yang disebabkan oleh biaya transportasi / logistic mengakibatkan perdagangan antar wilayah (kebutuhan dalam negeri) tidak mendapat porsi yang seimbang dengan pangsa ekspor</li> <li>5. Pengelolaan limbah padat dan cair dari industri pengolahan sawit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peninjauan kembali peraturan menteri dalam negeri terkait larangan sementara ekspor CPO dan produk turunan lainnya seiring dengan komitmen pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang telah diselesaikan</li> <li>2. Menetapkan usulan lokasi dan luasan pelepasan kawasan hutan pada area-area yang telah terverifikasi dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan</li> <li>3. Membangun pelabuhan baru dengan infrastruktur memadai yang dapat menerima dan melayani kapal dengan kapasitas loading minimal 20.000 DWT (kapal cargo dan kapal curah cair)</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas layanan instalasi pengolahan limbah padat dan limbah cair industri (B3)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi peraturan terkait rencana tata ruang</li> <li>2. <b>Monitoring</b> dan evaluasi pemanfaatan ruang</li> <li>3. Memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha yang melakukan upaya             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemenuhan standard keamanan dan sertifikasi usaha ramah lingkungan</li> <li>b. melakukan diversifikasi usaha pengolahan cpo menjadi produk turunan lainnya</li> </ol> </li> <li>4. Program perbaikan dan rehabilitasi lingkungan</li> </ol>

**BAB 4**  
**Visi pengembangan, Kebijakan & Strategi**  
**Hilirisasi Industri**



## **1. VISI PENGEMBANGAN**

Visi Pembangunan Sektor Strategis Perkebunan dan industri pengolahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah

***“INTEGRASI PEMBANGUNAN HILIRISASI INDUSTRI BERBASIS AGRO UNTUK  
PENGUATAN EKONOMI, DAYA SAING WILAYAH DAN PEMERTAAN  
PEMBANGUNAN DI WILAYAH KOTAWARINGIN BARAT “***

### **1.1 RUMUSAN KEBIJAKAN**

Guna mendukung pencapaian visi tersebut, Rumusan Kebijakan yang perlu dilaksanakan antara lain

1. Memberikan fasilitasi dan ruang akomodasi yang memungkinkan komunikasi bisnis, kerjasama korporasi dapat berjalan efektif dan lebih produktif
2. Mengakomodasi kebutuhan ruang untuk pengembangan/perluasan industri pengolahan disekitar lokasi perkebunan dan industri yang sudah ada agar manajemen rantai lebih efisien
3. Membangun koneksitas infrastruktur antara kawasan industri dan cluster industri dengan kawasan ekonomi khusus
4. Mendorong kesepakatan bersama antar daerah yang berbatasan dengan kotawaringin barat untuk meningkatkan produktifitas komoditi perkebunan kelapa sawit untuk menjamin ketersediaan rantai pasok industri
5. Melakukan revitalisasi terhadap sentra perkebunan rakyat dan perkebunan swasta yang mengalami penurunan produksi
6. Melakukan pemeliharaan terhadap alur utama pelayaran kumai dan rawa pasangsurut untuk mendukung keamanan lalu lintas pelayaran

### **1.2 STRATEGI**

Strategi yang akan ditempuh untuk melaksanakan percepatan hilirisasi di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain

1. Melakukan Fasilitasi Percepatan Sertifikasi (Ispo, Iso 9001:2015 Kepada Pelaku Usaha Perkebunan Dan Industri Pengolahan
2. Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang
3. Memberikan Ruang Kepada Umkm Untuk Terlibat Dalam Siklus Manajemen Rantai Pasok Kelapa Sawit

- Penanganan Gulma & Vegetasi Semak Dengan Kegiatan Peternakan
- Pemanfaatan Tegakan Sawit Untuk Pembuatan Gula Aren/Nira, Material Flooring & Pendukung Ornamen Dekoratif
- 4. Memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha yang melakukan upaya
  - Pemenuhan Standard Keamanan Dan Sertifikasi Usaha Ramah Lingkungan
  - Melakukan Diversifikasi Usaha Pengolahan CPO Menjadi Produk Turunan Lainnya
- 5. Program Perbaikan Dan Rehabilitasi Lingkungan
- 6. Melakukan fasilitasi dan pembinaan teknis kepada kelompok dan pelaku usaha perkebunan rakyat tentang tata kelola usaha perkebunan yang efektif dan efisien
- 7. Mengkaji sistem pengangkutan/distribusi komoditi CPO yang efisien
- 8. Penambahan sarana bantu navigasi pelayaran di area masuk alur, dan area labuh kapal
- 9. Memberikan fasilitasi dan pembinaan teknis kepada pelaku usaha perkebunan dan industri pengolahan untuk menerapkan pengelolaan kegiatan usaha yang ramah lingkungan
- 10. Melakukan verifikasi dan fasilitasi teknis kegiatan usaha yang lokasi usahanya berada dalam kawasan hutan (pemenuhan syarat proses pelepasan kawasan hutan)
- 11. Memberikan fasilitas insentif bea keluar/masuk komponen dan hasil produksi
- 12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan perkebunan khususnya yang terkait dengan fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha perkebunan rakyat.

## **2. PERAN PEMERINTAH DALAM HILIRISASI INDUSTRI**

Dalam kegiatan hilirisasi industri berbasis kelapa sawit, peran pemerintah sangat penting bagi para pelaku usaha dan pihak yang terlibat dalam ekosistem industri turunan kelapa sawit mulai dari

### **a. Ketersediaan pasokan TBS**

Ketersediaan pasokan TBS sangat dipengaruhi oleh **ketersediaan lahan**,

**produktifitas perkebunan** (manajemen tata kelola perkebunan), **sistem kerjasama Plasma, sistem afiliasi antar perusahaan.**

Pertama, Dalam perspektif lahan, aspek legalitas yang diatur dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk perkebunan menjadi hal yang sangat penting untuk dicermati. peran pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) dalam mengakselerasi dokumen Rencana Tata Ruang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai problem tumpang tindih fungsi ruang perkebunan dengan fungsi lindung.

Kedua, peran pemerintah dalam menghasilkan produk kebijakan yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan transfer teknologi dalam pengelolaan perkebunan melalui kerjasama sistem plasma telah diimplementasikan oleh korporasi secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan perundangan. implementasi kebijakan yang dikawal dan dimonitor langsung oleh pemerintah akan dapat meminimalisir terjadinya konflik pemanfaatan ruang

Ketiga, peran pemerintah dalam mendorong implementasi konsep keserasian dan integrasi lahan antara kawasan hutan dengan kawasan permukiman dan kawasan perkebunan bertujuan untuk membangun kesepahaman dalam pemanfaatan ruang tetap mengedepankan keseimbangan lingkungan dan keanekaragaman hayati

**b. Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Pendukung**

Pembangunan infrastruktur dalam mendukung program hilirisasi industri dapat mencakup akses jalan, pelabuhan, jaringan utilitas kota membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai sesuai dengan kewenangan dengan yang telah diatur oleh peraturan perundangan.

Peran Pemerintah (Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat) dalam pengembangan infrastruktur dilakukan melalui penilaian terhadap prioritas sesuai dengan kebutuhan dan sifat yang mendesak (urgently) dengan berbagai alternative instrument pembiayaan (APBN, APBD Prop, APBD Kab, Dana Bagi Hasil Sawit, Cooperorate Social Responsibility).

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

c. Sistem Logistik dan Pemasaran Produk

Regulasi yang mengatur tentang sistem logistic dan pemasaran produk hasil olahan kelapa sawit berikut turunannya diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan mencegah monopoli bisnis yang tidak sehat. Pemerintah dapat membuat prioritas pelaku usaha pemasok hasil turunan kelapa sawit sesuai dengan area pelayanan dan kapasitas yang dimiliki. Seperti halnya kontrak lelang pasokan produk biofuel, biodiesel/bioethanol dapat ditetapkan berdasarkan lokasi perusahaan berproduksi, bukan ditetapkan semata-mata berdasarkan kemampuan manajerial perusahaan. hal ini seperti preseden yang dialami oleh PT. Sinar Alam Permai (Walmart Group) yang tengah berhasil memproduksi Biofuel-Biodiesel akan tetapi tidak dapat menyalurkan hasil produksi di wilayah Kalimantan Tengah karena gagal bersaing dalam proses lelang dengan perusahaan lain diluar Kalimantan tengah yang memiliki kapasitas manajerial dan pasokan yang lebih baik.

d. Insentif

Peran pemerintah dalam memberikan insentif fiscal untuk kegiatan investasi yang terkait dengan produk turunan kelapa sawit pada dasarnya telah diatur dalam PP 78 /2019 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Hal ini seperti terlihat pada tabel

Tabel 10 Pemberian insentif Pajak untuk kegiatan usaha yang terkait dengan Kelapa Sawit

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46	Industri <i>Margarine</i>	10412	<i>Margarine</i>	Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437
47	Industri Minyak Mentah Kelapa	10422	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
48	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
49	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	10424	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
50	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 10435, 10436, dan/atau KBLI 10437
51	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

e. Sertifikasi ISPO-RSPO

Peran pemerintah (Pusat, Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Kotawaringin Barat) dalam mendorong pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan kelapa sawit yang berwawasan lingkungan dan menerapkan program pembangunan berkelanjutan tidak hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga akan meningkatkan nilai jual produk dan daya saing produk dipasar internasional.

Peran pemerintah dalam program hilirisasi secara spesifik dapat dilihat pada matrik berikut

### **3. INDIKASI PROGRAM**

Indikasi program merupakan rencana operasional kegiatan pemanfaatan ruang yang meliputi beberapa aspek pengembangan yang telah dirancang guna mewujudkan visi pembangunan kedepan. Indikasi program pada dasarnya bersifat indikatif, dan diharapkan dapat menjadi indikator dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Susunan program pembangunan harus bersinergi dengan kebijaksanaan pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten. Indikasi program disusun secara bertahap sesuai dengan tingkat prioritas kepentingan yang menjadi skenario pengembangan, tahapan tersebut dijabarkan dalam target jangka menengah yakni setiap 5 (lima) tahunan hingga akhir tahun rencana sehingga akan terdapat 2 (dua) tahapan yang menjadi prioritas pengembangan.

Indikasi program di wilayah perencanaan secara spesifik dapat dilihat pada Tabel

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Tabel 11 Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Prov, dan Pemerintah Kabupaten Dalam Program hilirisasi Industri

Peran	Pemerintah Pusat	Pemerintah Prov. Kalimantan Tengah	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Pasokan dan Harga TBS	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menetapkan harga TBS perperiodik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mengintegrasikan fungsi ruang dengan kabupaten yang berbatasan</li> </ul>
Legalitas Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mengeluarkan izin konsesi perkebunan</li> <li>■ Menetapkan kawasan perkebunan nasional berdasarkan prioritas komoditi strategis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menetapkan fungsi ruang untuk kegiatan perkebunan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi Kalimantan tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menetapkan fungsi ruang untuk kegiatan perkebunan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten</li> <li>■ Memberikan penilaian dan rekomendasi teknis KKPR Perkebunan</li> </ul>
Sistem Plasma Perkebunan	Menetapkan Prosentase Besarnya Prosentase Plasma	Melakukan pemantauan bahwa implementasi kebijakan plasma telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mengatur mekanisme administratif sistem plasma</li> </ul>
Integrasi Kawasan Hutan dan Perkebunan	Memberikan insentif/stimulus bagi inisiator/fasilitator yang berhasil mengimplementasikan konsep integrasi kawasan hutan dan perkebunan	Memberikan fasilitasi teknis kepada pemerintah kabupaten yang terpilih sebagai lokasi pilot project	Menetapkan lokasi pilot project integrasi kawasan hutan dan perkebunan
Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menetapkan alokasi sharing dana bagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Melakukan pemeliharaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menetapkan prioritas infrastruktur</li> </ul>



**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Peran	Pemerintah Pusat	Pemerintah Prov. Kalimantan Tengah	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Infrastruktur	<p>hasil sawit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menetapkan kriteria infrastruktur dan program yang dapat dibiayai</li> <li>■ Melakukan pemeliharaan infrastruktur sesuai kewenangan</li> </ul>	<p>infrastruktur sesuai kewenangan</p>	<p>dan tahapan waktu pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menyiapkan readiness criteria infrastruktur yang akan dibiayai melalui DBHS</li> <li>■ Melakukan pemeliharaan infrastruktur sesuai kewenangan</li> </ul>
Insentif Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menetapkan jenis/bidang usaha yang mendapat fasilitas pajak</li> <li>■ Menetapkan pelaku usaha/kegiatan usaha yang masuk dalam fasilitas berikat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mengusulkan kegiatan usaha baru yang dapat mendapatkan fasilitas pajak dari pemerintah pusat</li> <li>■ Melakukan fasilitasi pengembangan kawasan industri strategis di daerah</li> </ul>
Kerjasama antar daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mendorong pengelolaan infrastruktur berskala regional</li> <li>■ Menetapkan kriteria, mekanisme pembangunan infrastruktur dan pemrakarsa (badan yang berwenang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Melakukan pemetaan jenis dan lokasi pengelolaan infrastruktur berskala regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Membantu memberikan informasi/pertimbangan/ penilaian objek dan lokasi infrastruktur</li> </ul>

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Tabel 12 Indikasi Program Pembangunan Untuk Mendukung Upaya Hilirisasi Industri Di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	PROGRAM	SASARAN/LOKASI						INSTANSI/ OPD/ SWASTA
			Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	Th. 2027	Th. 2028	
1	Fasilitasi Teknis Penyelesaian Delineasi Kegiatan Perkebunan Di Kawasan Hutan	Seluruh Wilayah Kabupaten						Dinas PUPR Kab. Kotawaringin Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
2	Sinkronisasi Rencana Penetapan Kawasan Perkebunan dan dengan Kabupaten yang berbatasan untuk meminimalisir konflik pemanfaatan ruang	Seluruh Wilayah Kabupaten						Dinas PUPR Kab. Kotawaringin Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan, Dinas Pertanian kab. Kotawaringin Barat
3	Fasilitasi Teknis Pemenuhan Program Sertifikasi Kegiatan Perkebunan Berkelanjutan	Seluruh Wilayah Kabupaten						Dinas pertanian, dinas perkebunan prov. Kalimantan tengah
	<input type="checkbox"/> Penataan Lanskap Kawasan Perkebunan sesuai dengan hasil Identifikasi elemen lingkungan yang memiliki nilai konservasi tinggi							DLH, Dinas pertanian, dinas perkebunan prov. Kalimantan tengah
	<input type="checkbox"/> Menyusun dan mengimplementasikan program konservasi lingkungan secara berkelanjutan							DLH, Dinas pertanian, dinas perkebunan prov. Kalimantan tengah
4	Pengintegrasian Data Spasial Perkebunan (Inti, Plasma, Kebun Masyarakat) Berdasarkan Masa Tanam	Seluruh Wilayah Kabupaten						Dinas Pertanian, Dinas PUPR kab. Kotawaringin Barat
5	Transfer Pengetahuan Dan Alih teknologi Stakeholder Yang Masuk Lingkup Perkebunan Plasma							

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	PROGRAM	SASARAN/LOKASI						INSTANSI/ OPD/ SWASTA
			Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	Th. 2027	Th. 2028	
	<input type="checkbox"/> Pengelolaan Kebun Mulai Dari Planting, Pemeliharaan (Penanganan Penyakit Dan Vector Hama), Penanganan Panen )	Bumdes, Petani Perkebunan Rakyat/Mandiri Seluruh Wilayah Kabupaten						Perusahaan Sawit Pengelola Plasma
	<input type="checkbox"/> Fasilitasi Pemanfaatan Material Limbah Perkebunan (Batang Pohon Pasca Replanting) Menjadi Produk Bernilai Ekonomi Tinggi (Gula Merah, Flooring & Mix Decoratif)	Kelompok Petani Perkebunan Sawit, Bumdes, Pelaku Usaha Umkm Seluruh Wilayah Kabupaten						Perusahaan Industri Pengolahan Sawit
	<input type="checkbox"/> Pembinaan Pelaku Usaha Umkm Yang Memiliki Mutualisme Dalam Kegiatan Perkebunan (Pembiakan Sapi Untuk Pengendalian Gulma / Rumput Disekitar Pohon Dan Area Pembatas)	Kelompok Petani Perkebunan Sawit, Bumdes, Pelaku Usaha Umkm Seluruh Wilayah Kabupaten						Perusahaan Perkebunan Sawit
	<input type="checkbox"/> Pembinaan Pelaku Usaha Umkm Untuk Pemanfaatan Limbah Industri Pengolahan (Pupuk Organik)	Seluruh Wilayah Kabupaten						Perusahaan Industri Pengolahan Sawit
5	Revitalisasi Lahan Perkebunan Rakyat yang mengalami Penurunan Hasil Panen (Memasuki Masa Replanting, Faktor Stres Tanaman)	Wilayah Prioritas						Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat,
6	Penyediaan Akses Benih Unggul untuk mendukung kualitas dan ketersediaan TBS							Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat, Perusahaan Perkebunan
7	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Di Area Perkebunan							

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	PROGRAM	SASARAN/LOKASI						INSTANSI/ OPD/ SWASTA
			Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	Th. 2027	Th. 2028	
	<input type="checkbox"/> Pengamanan satwa liar dilindungi yang memasuki area perkebunan	Kawasan Perkebunan						Perusahaan Perkebunan
	<input type="checkbox"/> Pengamanan Jenis Vegetasi Langka Pada Area Rencana Planting (Proses Pematangan lahan)	Kawasan Perkebunan						Perusahaan Perkebunan
	<input type="checkbox"/> Pembangunan Kolam Retensi (Penampungan Air) Untuk Fungsi Pendukung Perkebunan (Pembatas/ Pengaman)	Kawasan Perkebunan						Perusahaan Perkebunan
8	Pembangunan Unit Industri Pengolahan FATTY ALCOHOL/FATTY ACYD	Kawasan Industri SBI						PT. Citra Borneo Indah
9	Pembangunan Unit Industri Pengolahan Pakan Ternak Dari Bahan Pelepah, Solid Dan Bungkil Sawit	Cluster KPI						Swasta
10	Peningkatan Kapasitas Industri Pemurnian CPO DAN PKO	Cluster KPI						Perusahaan Industri Pengolahan
11	Pengelolaan Produk Samping Industri Pengolahan (Serat Dan Tandan Kosong) Menjadi Serat Selulosa	Cluster KPI						Swasta
12	Memberikan kemudahan dan insentif bagi pelaku usaha yang melakukan upaya diversifikasi produk berbasis kelapa sawit	<input type="checkbox"/> Seluruh Wilayah Kabupaten						Perusahaan Industri Pengolahan
13	Peningkatan Kapasitas Jalan Prioritas Yang Menjadi Lintasan Angkutan Material Dan Komoditi Perkebunan/ Industri	<input type="checkbox"/> jalan nasional						Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah
		<input type="checkbox"/> jalan provinsi						DINAS PUPR PROV. KALIMANTAN

**DOKUMEN KAJIAN POTENSI HILIRISASI INDUSTRI  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	PROGRAM	SASARAN/LOKASI						INSTANSI/ OPD/ SWASTA
			Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	Th. 2027	Th. 2028	
	Pengolahan							TENGAH
		<input type="checkbox"/> jalan kabupaten						<input type="checkbox"/> Dinas PUPR KAB. Kotawaringin Barat <input type="checkbox"/> CO Sharing Swasta (PKS)
14	Pemeliharaan Alur Pelayaran	<input type="checkbox"/> Section A (Muara Sungai/Pintu Masuk Alur)						<input type="checkbox"/> PT. Pelindo <input type="checkbox"/> Co Sharing Swasta (PKS)
		<input type="checkbox"/> Section B (Alur Utama)						
15	Sinkronisasi program kebutuhan ruang untuk kegiatan ekspansi dengan substansi Rencana Tata Ruang							
	<input type="checkbox"/> Kegiatan Perluasan Area Perkebunan	<input type="checkbox"/> Seluruh Wilayah Kabupaten						<input type="checkbox"/> Dinas PUPR KAB. Kotawaringin Barat
	<input type="checkbox"/> Kegiatan Perluasan Area Industri	<input type="checkbox"/> Seluruh Wilayah Kabupaten						<input type="checkbox"/> Dinas PUPR KAB. Kotawaringin Barat